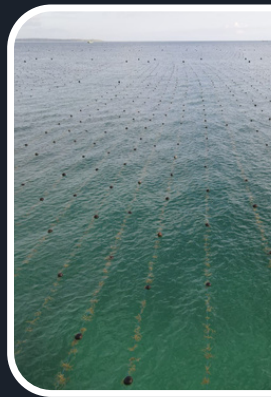




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERBENIHAN TAHUN 2023



DIREKTORAT PERBENIHAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2023




KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Direktorat Perbenihan sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya di bidang perikanan budi daya.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Perbenihan selama tahun 2023, serta hasil yang telah diperoleh, khususnya dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budi daya.

Laporan Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan, sehingga dapat menjadikan bahan evaluasi serta dapat memberikan umpan balik untuk pencapaian kinerja pada tahun 2024 atau dapat dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja organisasi serta bahan evaluasi melalui langkah-langkah perbaikan pelayanan yang lebih profesional dan transparan bagi masyarakat.

Jakarta, 31 Januari 2024
Direktur Perbenihan



Nono Hartanto

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab Direktorat Perbenihan.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta, 31 Januari 2024

Perencana Madya
Tim Reviu LKj Ditjen Perikanan Budi Daya
Kementerian Kelautan dan Perikanan



Dr. M. Rifqi, M.Si.
NIP. 197507262002121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TELAH DI REVIU.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	1
BAB 1. PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3. Tugas dan Fungsi.....	6
1.4. Sumber Daya Manusia.....	8
1.5. Permasalahan Utama.....	10
1.6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj).....	10
BAB 2 . PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Rencana Strategis Perikanan Budi Daya Tahun 2020-2024.....	12
2.2. Penetapan Kinerja.....	13
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2023.....	21
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	24
SASARAN KEGIATAN 1 : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat Bidang Perbenihan.....	24
IKU 1 : Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perbenihan.....	24
SASARAN KEGIATAN 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan.....	26
IKU 1 : Persentase Bantuan Prasarana Budi Daya Laut yang Disalurkan.....	26
IKU 2 : Persentase Bantuan Sarana Unit Pembenihan yang Disalurkan.....	27
IKU 3 : Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan.....	29

IKU 4 : Persentase Pusat Produksi Benih dan Induk yang Operasional.....	31
IKU 5. Persentase bantuan benih yang disalurkan.....	37
IKU 6 : Persentase bantuan calon induk yang disalurkan.....	39
IKU 7 : Produksi Calon Induk di UPT.....	42
IKU 8. Produksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala <i>Intermediate</i> di Unit Pelaksana Teknis.....	44
IKU 9 : Persentase Keberhasilan Unit Pelaksana Teknis yang Mengembangkan Pembenihan pada Komoditas Lobster dan Kepiting.....	45
IKU 10 : Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun.....	47
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha.....	52
IKU 1: Persentase Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang Diterbitkan.....	52
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan.....	54
IKU 1 : Nilai PM SAKIP Direktorat Perbenihan.....	54
SASARAN STRATEGIS 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan.....	55
IKU 1 : Persentase Pelaku Usaha yang Terlibat di Kegiatan Perbenihan Terintegrasi KUSUKA.....	55
IKU 2 : Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan.....	56
IKU 3 : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan.....	58
IKU 4 : Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Direktorat Perbenihan.....	59
IKU 5 : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan.....	60
IKU 6 : Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan.....	61
IKU 7 : Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan.....	62
IKU 8 : Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan.....	63
BAB 4. PENUTUP.....	65
4.1. KESIMPULAN.....	65
4.2. REKOMENDASI.....	65
DATA DUKUNG.....	67
A. Tenaga kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan.....	67
B. Persentase Bantuan Prasarana Budi Daya Laut yang Disalurkan.....	68

C. Persentase Bantuan Sarana Unit Perbenihan yang Disalurkan.....	71
D. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan.....	73
E. Persentase Pusat Produksi Benih dan Induk yang Operasional.....	74
F. Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan.....	76
G. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan.....	77
H. Produksi Calon Induk yang Disalurkan.....	78
I. Produksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala <i>Intermediate</i> di UPT (Planlet).....	79
J. Persentase Keberhasilan Unit Pelaksana Teknis yang Mengembangkan Pembenihan pada Komoditas Lobster dan Kepiting.....	80
K. Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun.....	81
L. Persentase Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang Diterbitkan Dibandingkan dengan Unit Pembenihan yang Dinilai.....	86
M. Nilai PM SAKIP Direktorat Perbenihan.....	87
N. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA.....	88
O. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup Direktorat Perbenihan..	89
P. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan.....	91
Q. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Satker Direktorat Perbenihan.....	94
R. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perbenihan.....	96
S. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan.....	98
T. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan.....	99
U. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Perbenihan Tahun 2023.....	1
Tabel 2.Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Perbenihan Tahun 2023.....	5
Tabel 3.Perubahan Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Perbenihan Tahun 2023	14
Tabel 4. Capaian Kinerja Kinerja Utama Tahun 2023.....	23
Tabel 5. Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan.....	25
Tabel 6. Persentase Penerima Bantuan Prasarana Budidaya Laut yang Disalurkan Tahun 2023	26
Tabel 7.Capaian indikator kinerja bantuan sarana unit pembenihan yang disalurkan tahun 2023.	27
Tabel 8. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan.....	30
Tabel 9.Capaian indikator kinerja pusat produksi benih dan induk yang operasional	32
Tabel 10.Capaian indikator kinerja persentase bantuan benih yang disalurkan	37
Tabel 11. Realisasi Bantuan Benih dan Restocking Tahun 2023.....	38
Tabel 12.Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat	40
Tabel 13. Realisasi bantuan calon induk tahun 2023.....	40
Tabel 14. Produksi Calon Induk yang Dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya.....	42
Tabel 15. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT.....	44
Tabel 16.Persentase Keberhasilan Unit Pelaksana Teknis yang Mengembangkan Pembenihan pada Komoditas Lobster dan Kepiting.....	46
Tabel 17. Capaian IKU Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Perbenihan.....	48
Tabel 18.Persentase Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang Diterbitkan	53

Tabel 19. Nilai PM SAKIP Direktorat Perbenihan.....	54
Tabel 20. Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA	55
Tabel 21. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan.....	57
Tabel 22. Nilai capaian IP ASN dari setiap komponen yang dinilai.....	57
Tabel 23. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan.....	59
Tabel 24. Persentase penyelesaian LHP BPK atas Satker Direktorat Perbenihan tahun 2023.....	60
Tabel 25. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perbenihan.....	61
Tabel 26. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan.....	62
Tabel 27. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Direktorat Perbenihan.....	63
Tabel 28. Capaian Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan Tahun 2023.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.....	8
Gambar 2. Data pegawai berdasarkan Golongan.....	9
Gambar 3. Data tingkat pendidikan pegawai Direktorat Perbenihan.....	9
Gambar 4. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024.....	12
Gambar 5. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024.....	13
Gambar 6. Perjanjian Kinerja awal Direktorat Perbenihan Tahun 2023.....	17
Gambar 7. Perjanjian Kinerja Revisi November Direktorat Perbenihan Tahun 2023.....	20
Gambar 8. Nilai Capaian Kinerja Tahun 2023.....	22
Gambar 9. Jenis bantuan sarana UPR.....	29
Gambar 10. Kolam Tandon Penampungan Air.....	33
Gambar 11. Bak Pemberokan Ikan di Broodstock Center Kab Musirawas.....	34
Gambar 12. Bak Pemberokan Ikan di Broodstock Center Kab Dharmasraya.....	34
Gambar 13. Peta sebaran bantuan calon induk tahun 2023.....	41
Gambar 14. Peta sebaran produksi calon induk di UPT DJPB tahun 2023....	43
Gambar 15. Peta sebaran unit pembenihan yang tersertifikasi CPIB tahun 2023.....	53

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja Sasaran Strategis dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja tersebut. Pada Tahun 2023, Direktorat Perbenihan memiliki empat Sasaran Strategis yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana pembudi daya ikan, peningkatan akses pemodalan dan jaminan usaha, meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budi daya bidang perbenihan, dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat satu indikator yang belum tercapai, yaitu Nilai PM SAKIP. Secara umum keberhasilan program-program sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan pengguna layanan. Uraian tingkat ketercapaian indikator akan lebih detil disampaikan pada Bab Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam aplikasi Kinerjaaku, capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Perbenihan pada tahun 2023 sebesar 116,17 % dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 21 indikator kinerja dengan rincian seperti terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Perbenihan Tahun 2023

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2023	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Target s/d DESEMBER	Capaian s/d DESEMBER	%
SK.01	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan			116,92			116,92	
	Persentase Bantuan Prasarana Budi Daya Laut yang Disalurkan							
IKSK.02	<i>Data Dukung1</i>	75	75	96,54	120	75	96,54	120
	Persentase Bantuan Sarana Unit Perbenihan yang Disalurkan							
IKSK.03	<i>Data Dukung1</i>	75	75	100	120	75	100	120
	Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan							
IKSK.04	<i>Data Dukung1</i>	75	75	100	120	75	100	120
	Persentase Pusat Produksi Benih dan Induk yang Operasional							
IKSK.05	<i>Data Dukung1</i>	40	40	55	120	40	55	120
	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan							
IKSK.06	<i>Data Dukung1</i>	75	75	114,06	120	75	114,06	120

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERBENIHAN TAHUN 2023

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2023	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Target s/d DESEMBER	Capaian s/d DESEMBER	%
IKSK.07	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan <i>Data Dukung1</i>	75	75	203,43	120	75	203,43	120
IKSK.08	Persentase Keberhasilan Unit Pelaksana Teknis yang Mengembangkan Pembenuhan pada Komoditas Lobster dan Kepiting <i>Data Dukung1</i>	100	100	100	100	100	100	100
IKSK.8	Produksi calon induk di UPT <i>Data Dukung1</i>	965.971,00	965.971,00	1.039.745,00	107,64	965.971,00	1.039.745,00	107,64
IKSK.9	Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT <i>Data Dukung1</i>	18.000,00	18.000,00	29.645,00	120	18.000,00	29.645,00	120
SK.02	Meningkatnya Akses Pemodal dan Jaminan Usaha			114,58			114,58	
IKSK.2.01	Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun <i>Data Dukung1</i>	60	60	68,75	114,58	60	68,75	114,58
SK.03	Meningkatnya Kualiiitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Perbenihan			119,05			119,05	
IKSK.3.1	Persentase sertifikat Cara Pembenuhan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan dibandingkan dengan unit pembenuhan yang dinilai <i>Data Dukung1</i>	80	80	95,24	119,05	80	95,24	119,05
SK.04	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Perbenihan			110,31			110,31	
IKSK.4.01	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup Direktorat Perbenihan <i>Data Dukung1</i>	81	81	84,91	104,83	81	84,91	104,83
IKSK.4.02	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Satker Direktorat Perbenihan <i>Data Dukung1</i>	100	100	100	100	100	100	100
IKSK.4.03	Nilai PM SAKIP Direktorat Perbenihan <i>Data Dukung1</i>	75	75	64,5	86	75	64,5	86
IKSK.4.04	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perbenihan <i>Data Dukung1</i>	75	75	100	120	75	100	120
IKSK.4.05	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan <i>Data Dukung1</i>	92	92	133,33	120	92	133,33	120
IKSK.4.06	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis lingkup Direktorat Perbenihan <i>Data Dukung1</i>	77,5	77,5	93,46	120	77,5	93,46	120
IKSK.4.08	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan <i>Data Dukung1</i>	75	75	100	120	75	100	120

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERBENIHAN TAHUN 2023

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2023	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Target s/d DESEMBER	Capaian s/d DESEMBER	%
IKSK.4.7	Persentase pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi KUSUKA <i>Data Dukung1</i>	80	80	694,89	120	80	694,89	120
IKSK.4.9	Persentase realisasi keuangan Direktorat Perbenihan <i>Data Dukung1</i>	98	98	99,98	102,02	98	99,98	102,02
SK.05	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan Bidang Perbenihan			120			120	
IKSK.5.1	Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perbenihan (orang) <i>Data Dukung1</i>	14.493,00	14.493,00	22.720,00	120	14.493,00	22.720,00	120

Capaian indikator pada tahun 2023 seperti terlihat Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja perbenihan sangat baik karena beberapa indikator kinerja utama telah melebihi target 100%.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budi daya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budi Daya perlu me-reformulasi kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga

prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Terkait dengan kebijakan tersebut Direktorat Perbenihan, berupaya untuk mendukung kebijakan tersebut melalui pemenuhan target dan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023 yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Perbenihan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan Bidang Perbenihan	1.	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan (Orang)	14.493
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2.	Persentase Bantuan Prasarana Budi Daya Laut yang Disalurkan (Persen)	75
		3.	Persentase Bantuan Sarana Unit Perbenihan yang Disalurkan (Persen)	75
		4.	Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan (Persen)	75
		5.	Persentase Pusat Produksi Benih dan Induk yang Operasional (Persen)	40
		6.	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75
		7.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75
		8.	Produksi Calon Induk di UPT (Ekor)	965.971
		9.	Produksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala <i>Intermediate</i> di UPT (Planlet)	18.000
		10.	Persentase Keberhasilan Unit Pelaksana Teknis yang Mengembangkan Pembenihan pada Komoditas Lobster dan Kepiting (Persen)	100
		11.	Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun (Persen)	60
3.	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha	12.	Persentase Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang Diterbitkan Dibandingkan dengan Unit Pembenihan yang Dinilai (Persen)	80
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Perbenihan	13.	Nilai PM SAKIP Direktorat Perbenihan (Nilai)	75
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan	14.	Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja	81

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Lingkup Direktorat Perbenihan (Indeks)	
	16. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan (Persen)	92
	17. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Satker Direktorat Perbenihan (Persen)	100
	18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perbenihan (Persen)	75
	19. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan (Persen)	75
	20. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis lingkup Direktorat Perbenihan (Persen)	77,5
	21. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbeohan (persen)	98

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Perbenihan tahun 2023 ini adalah sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran pada Direktorat Perbenihan tahun 2023. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini juga sebagai bahan evaluasi dan penilaian dalam pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Perbenihan Tahun 2023.

1.3. Tugas dan Fungsi

Direktorat Perbenihan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang induk, perbenihan ikan air tawar, perbenihan ikan air payau dan perbenihan ikan laut.

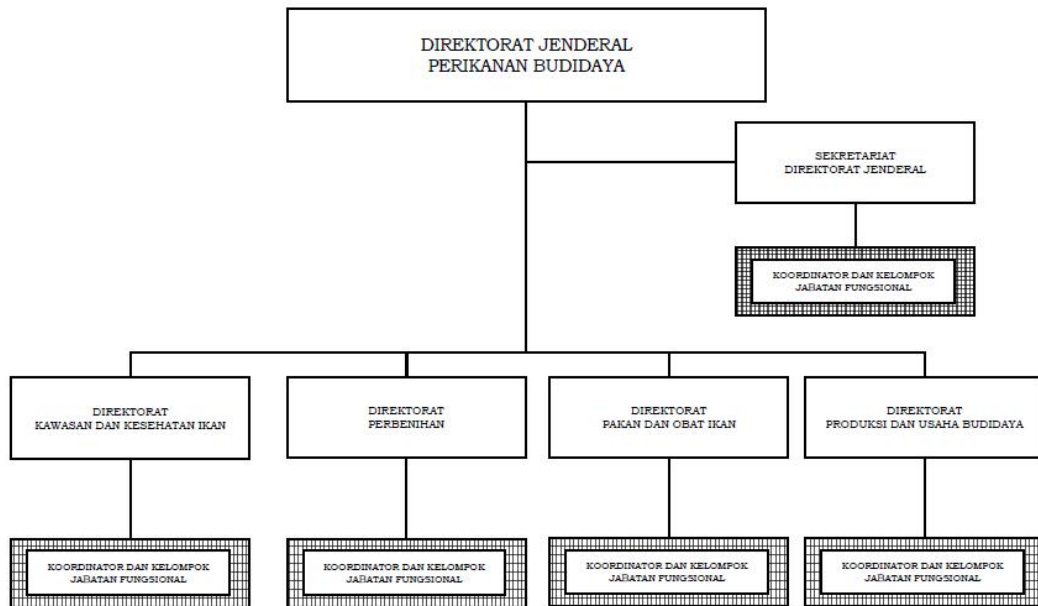
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Direktorat Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul; dan

f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Direktorat Perbenihan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA



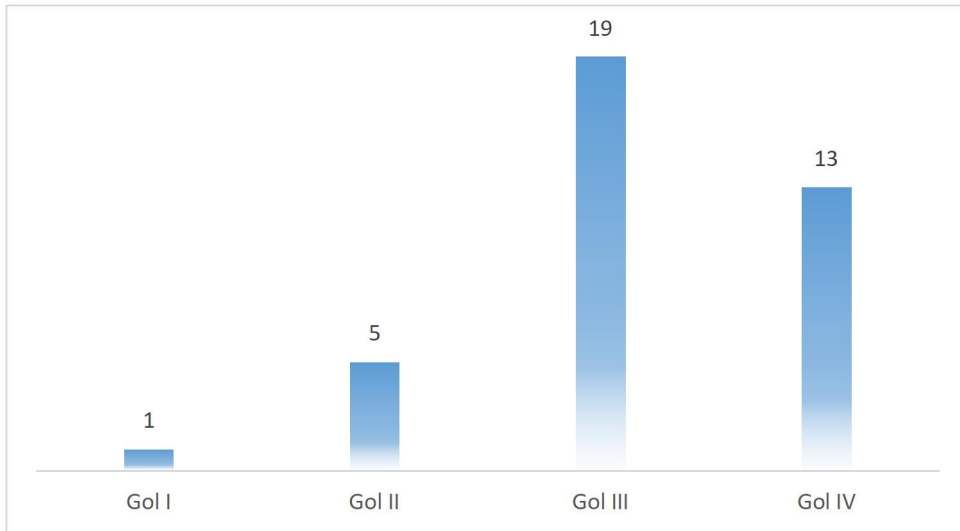
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

1.4. Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Perbenihan sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah sebanyak 45 orang yang tersebar pada 5 tim kinerja. Tim Kinerja di lingkup Direktorat Perbenihan terdiri atas :

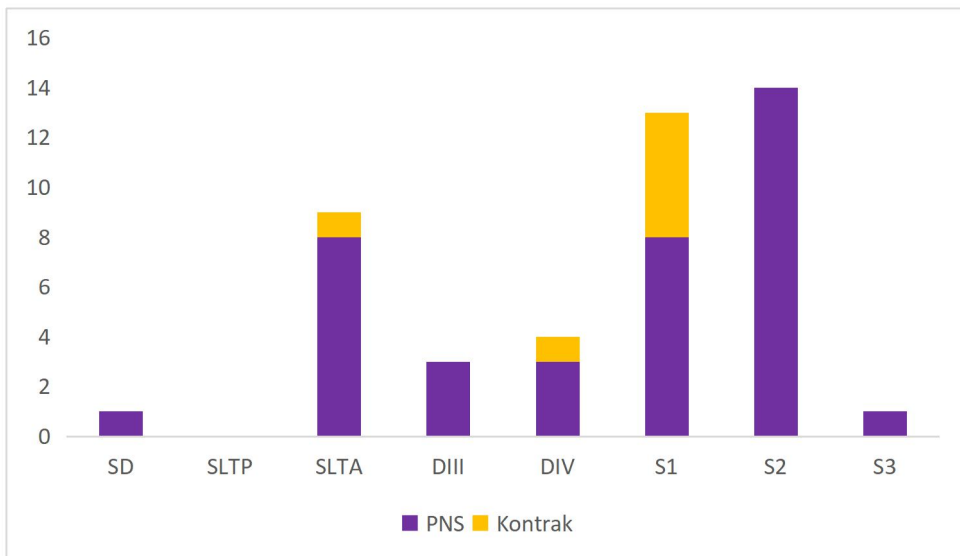
1. Tim Kerja Standardisasi Perbenihan
2. Tim Kerja Induk dan Sertifikasi CPIB
3. Tim Kerja Peningkatan Produksi Benih
4. Tim Kerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Laut
5. Tim Kerja Dukungan Manajerial

Data pegawai berdasarkan pada Golongan Kepangkatan terlihat pada Grafik berikut.



Gambar 2. Data pegawai berdasarkan Golongan

Dari Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Direktorat Perbenihan merupakan golongan III sebanyak 19 orang atau 50%, disusul golongan IV sebanyak 13 orang atau 34,21%.



Gambar 3. Data tingkat pendidikan pegawai Direktorat Perbenihan

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan pegawai Direktorat Perbenihan adalah S2 sebanyak 14 orang atau 31,11%, kemudian tingkat pendidikan S1 sebanyak 13 orang atau 28,89%, serta SLTA sebanyak 9 orang atau 20%.

1.5. Permasalahan Utama

Produksi perikanan budi daya pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 22,65 juta ton untuk komoditas ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut. Berdasarkan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, produksi perikanan budi daya ditargetkan sebesar 20,06 juta ton pada tahun 2023. Upaya pencapaian atas target tersebut dengan berfokus pada beberapa komoditas unggulan yaitu udang, lobster, kepiting, nila, dan rumput laut.

Tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan perikanan budi daya khususnya perbenihan ke depan diantaranya yaitu:

1. Ketersediaan induk dan benih yang memadai di sentra-sentra produksi perikanan budi daya.
2. Perbaikan sistem logistik perbenihan melalui peningkatan peran unit pembenihan daerah sebagai *multiplication breeding center* bagi penyediaan induk-induk unggul di wilayahnya masing-masing.
3. Penyediaan dan penciptaan induk-induk unggul baru yang adaptif terhadap serangan penyakit dan kondisi perubahan lingkungan.
4. Masih minimnya unit pembenihan yang telah tersertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) guna memastikan ketersediaan benih bermutu di masyarakat.
5. Adanya perubahan nomenklatur pada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Perpres Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengalihkan kegiatan sertifikasi dari unit teknis terkait menjadi tersentral pada satu Badan Mutu.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Laporan Kinerja ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2023. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Perbenihan, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 dengan target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan

bagi perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Perbenihan pada tahun 2023.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Perbenihan serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Perbenihan termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2020 - 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2023 serta penetapan kinerja Direktorat Perbenihan.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Perbenihan serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2023. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
6. **Lampiran**, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/ pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab III.

BAB 2 . PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perikanan Budi Daya Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Rencana Strategis Perikanan Budidaya 2020-2024, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budi daya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budi daya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budi daya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 4. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budi daya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan

Produksi Perikanan Budi Daya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudi Daya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Perbenihan telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu:

- a. Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perbenihan Tahun 2023 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Direktorat Perbenihan selama 1 (satu) tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja;
- b. Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2023; dan
- c. Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi setiap triwulannya.

2.2. Penetapan Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia melalui target sasaran kinerja serta indikator kinerja

kegiatan yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (*outcome*) maupun keluaran (*output*).

Perjanjian Kinerja awal Direktorat Perbenihan Tahun 2023 mengalami beberapa kali perubahan indikator dan target seiring dinamika perubahan DIPA dan penyesuaian indikator karena kebijakan. Beberapa perubahan Perjanjian Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2023 tersajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perubahan Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Perbenihan Tahun 2023

NO	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
1.	Terbangunnya prasarana dan sarana pusat produksi benih dan induk (Target : 3 lokasi)	Persentase Pusat Produksi Benih dan Induk yang Operasional (Target : 40 persen)	Untuk melihat kebermanfaatan Pusat Produksi Benih dan Induk di 3 (tiga) lokasi, serta progress pemanfaatannya setiap tahun.
2.	Rekomendasi kebijakan tata kelola bidang perbenihan (Target : 9 rekomendasi kebijakan)	Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun (Target : 60 persen)	Untuk menghitung persentase rekomendasi kebijakan yang disusun dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perbenihan ikan.
3.	Nilai rekon SAKIP lingkup Direktorat Perbenihan (Target : 93 persen)	Nilai PM SAKIP Direktorat Perbenihan (Target : 75 Nilai)	Adanya perubahan penilaian yang semula Rekonsiliasi menjadi Penilaian Mandiri.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PERBENIHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nono Hartanto**
Jabatan : **Direktur Perbenihan**
Selanjutnya disebut **pihak pertama**
Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budidaya**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

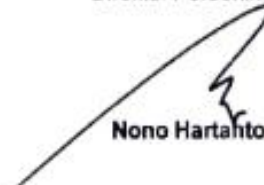
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Perbenihan


Nono Hartanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PERBENIHAN**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	1 Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perbenihan (orang)	14 493
	2 Persentase penerima bantuan prasarana budidaya laut yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat (persen)	75
	3 Persentase bantuan sarana unit perbenihan yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat (persen)	75
	4 Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat (persen)	75
	5 Terbangunnya prasarana dan sarana pusat produksi benih dan induk (lokasi)	3
	6 Persentase bantuan benih yang tersalurkan berdasarkan usulan masyarakat (persen)	75
	7 Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan berdasarkan usulan masyarakat (persen)	75
	8 Produksi calon induk di UPT (ekor)	965.971
	9 Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT (planlet)	18.000
	10 Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan (persen)	100
2. Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha	11 Rekomendasi kebijakan tata kelola bidang perbenihan (rekomendasi kebijakan)	9
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Perbenihan	12 Persentase sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan dibandingkan dengan unit pembenihan yang dinilai (persen)	80
4. Tata kelola pemerintahan yang baik pada Direktorat Perbenihan	13 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	81
	14 Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Direktorat Perbenihan (persen)	100
	15 Nilai rekon SAKIP lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	93
	16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan	75

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	kinerja lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	
	17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Perbenihan (nilai)	92
	18 Tingkat efektivitas melaksanakan kegiatan prioritas / strategis lingkup Direktorat Perbenihan (nilai)	77,5
	19 Persentase pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi KUSUKA (persen)	80
	20 Persentase layanan perkantoran pusat (persen)	75
	21 Persentase realisasi keuangan Direktorat Perbenihan (persen)	98

Data Anggaran

NO	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pelayanan Publik Kepada Lembaga	2.250.000.000
2.	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	9.120.000.000
3.	Bantuan Peralatan / Sarana	75.117.500.000
4.	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	2.000.000.000
Total Anggaran Direktorat Perbenihan Tahun 2023		88.487.500.000

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama Direktur
Perbenihan


Nono Hartanto

Gambar 6. Perjanjian Kinerja awal Direktorat Perbenihan Tahun 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL dijenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PERBENIHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nono Hartanto**
Jabatan : Direktur Perbenihan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Perbenihan



Nono Hartanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PERBENIHAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan Bidang Perbenihan	1. Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan (Orang)	14.493
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2. Persentase Bantuan Prasarana Budi Daya Laut yang Disalurkan (Persen)	75
		3. Persentase Bantuan Sarana Unit Perbenihan yang Disalurkan (Persen)	75
		4. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan (Persen)	75
		5. Persentase Pusat Produksi Benih dan Induk yang Operasional (Persen)	40
		6. Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75
		7. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75
		8. Produksi Calon Induk di UPT (Ekor)	965.971
		9. Produksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala <i>Intermediate</i> di UPT (<i>Planlet</i>)	18.000
		10. Persentase Keberhasilan Unit Pelaksana Teknis yang Mengembangkan Pembenihan pada Komoditas Lobster dan Kepiting (Persen)	100
		11. Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun (Persen)	60
		3.	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan	13. Nilai PM SAKIP Direktorat Perbenihan (Nilai)	75

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERBENIHAN TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan	14. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
	15. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup Direktorat Perbenihan (Indeks)	81
	16. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan (Persen)	92
	17. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Satker Direktorat Perbenihan (Persen)	100
	18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perbenihan (Persen)	75
	19. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan (Persen)	75
	20. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan (Persen)	77,5
	21. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan (Persen)	98

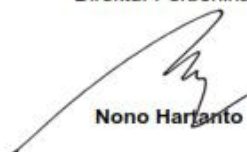
Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Perbenihan



Nono Harjanto

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pelayanan Publik Kepada Lembaga	1.875.000.000
2.	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	8.332.000.000
3.	Bantuan Peralatan / Sarana	50.286.500.000
4.	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	5.310.000.000
Total Anggaran Direktorat Perbenihan Tahun 2023		65.803.500.000

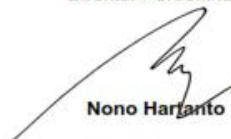
Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Perbenihan



Nono Harjanto

Gambar 7. Perjanjian Kinerja Revisi November Direktorat Perbenihan Tahun 2023

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Perbenihan dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Perbenihan dengan data pencapaian kerjanya. Metode pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja dan cara pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh Tim Kinerja, sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat yakni dari unit kerja pemilik kegiatan.

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2023, menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/ semesteran/ tahunan);
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id”;
5. Status capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” ditunjukkan dengan warna : (i) merah, untuk indikator yang di bawah batas toleransi; (ii) kuning, untuk indikator dalam batas toleransi; dan (iii) hijau, untuk indikator yang telah/melebihi target.

Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*.

1. *Maximize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

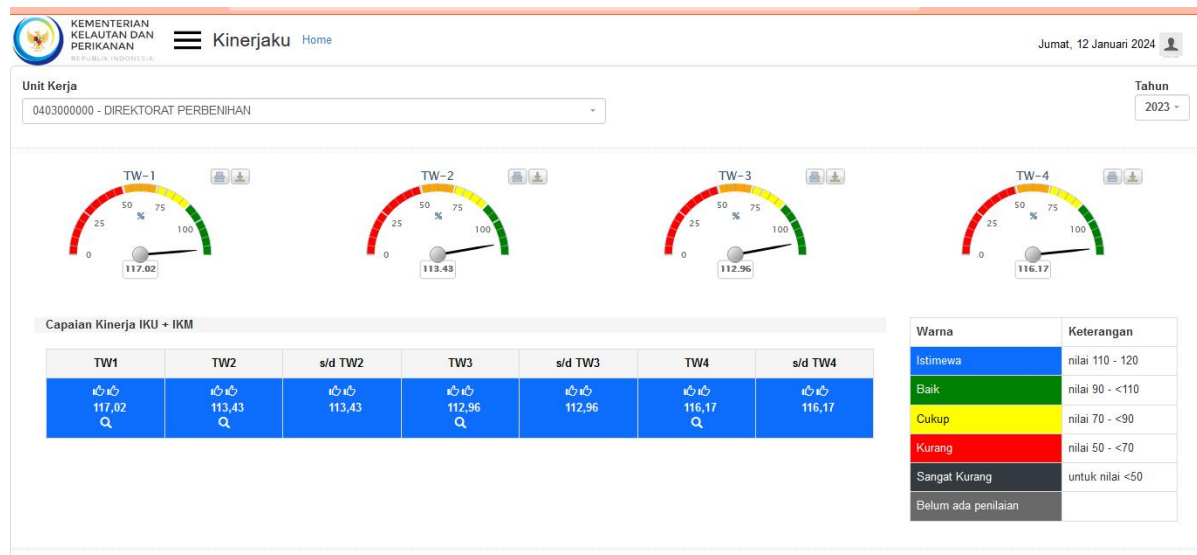
2. *Minimize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.

3. *Stabilize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan penerapan Aplikasi "Kinerjaku", capaian NKO Direktorat Perbenihan triwulan IV tahun 2023 sebesar 116,17 seperti terlihat dalam gambar 2.4.



Gambar 8. Nilai Capaian Kinerja Tahun 2023

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi disajikan sebagai pertanggungjawaban pimpinan atas nama organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis yang realistis dan formal sesuai aturan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawaban hasil penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja memastikan bahwa pelaksanaan anggaran yang ditetapkan merupakan cara untuk mencapai sasaran strategis.

Akuntabilitas capaian organisasi Direktorat Perbenihan, yang menjadi indikator utama sebanyak 12 Indikator dan 9 indikator kegiatan dengan rincian seperti disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Kinerja Kinerja Utama Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan	Orang	14.493	22.720	120
2	Persentase Bantuan Prasarana Budi Daya Laut yang Disalurkan	Persen	75	96,54	128,72
3	Persentase Bantuan Sarana Unit Perbenihan yang Disalurkan	Persen	75	100	133,33
4	Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan	Persen	75	100	120
5	Persentase Pusat Produksi Benih dan Induk yang Operasional	Persen	40	55	120
6	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan	Persen	75	114,06	120
7	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan	Persen	75	203,43	120
8	Produksi Calon Induk di UPT	Ekor	965.971	1.039.745	107,64
9	Produksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala <i>Intermediate</i> di UPT	Planlet	18.000	29.645	120
10	Persentase Keberhasilan Unit Pelaksana Teknis yang Mengembangkan Pembenuhan pada Komoditas Lobster dan Kepiting	Persen	100	100	100
11	Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun	Persen	60	68,75	114,58

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	%
12	Persentase Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang Diterbitkan Dibandingkan dengan Unit Pembenihan yang Dinilai	Persen	80	95,24	119,05
13	Nilai PM SAKIP Direktorat Perbenihan	Nilai	75	64,5	86
14	Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA	Persen	80	694,89	120
15	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup Direktorat Perbenihan	Indeks	81	84,91	104,83
16	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan	Persen	92	133,33	120
17	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Satker Direktorat Perbenihan	Persen	100	100	100
18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perbenihan	Persen	75	100	120
19	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan	Persen	75	100	120
20	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis lingkup Direktorat Perbenihan	Persen	77,5	93,46	120
21	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan	Persen	98	99,98	102,02

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

SASARAN KEGIATAN 1 : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan Bidang Perbenihan

IKU 1 : Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perbenihan

Indikator kinerja ini merupakan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pengelolaan Perbenihan Ikan pada Direktorat Perbenihan tahun 2023 baik secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan program prioritas dan bantuan pemerintah. Tenaga kerja yang terlibat dalam program prioritas terdiri dari kegiatan bantuan benih, bantuan calon induk, bantuan Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL), bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE, bantuan sarana dan prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR), dan bantuan jaring yang dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan dan UPT DJPB.

Tabel 5. Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan

Sasaran Strategis : Ekonomi sektor perikanan Budidaya meningkat bidang perbenihan									
Indikator Kinerja : Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	20.210	14.493	22.720	156,76%	-	-

Tenaga kerja yang terlibat pada Kegiatan Pengelolaan Perbenihan Ikan pada Direktorat Perbenihan tahun 2023 difokuskan pada lokasi sentral budidaya ikan, pengembangan Kampung Perikanan Budidaya (KPB), serta pengembangan Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN).

Realisasi jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan bantuan pemerintah di bidang Perbenihan hingga akhir tahun 2023 dapat dilaporkan telah tercapai sebesar 22.720 orang atau sebesar 156,77 % dari target 14.493 orang. Besarnya capaian jumlah tenaga kerja yang terserap terdiri dari tenaga yang terlibat dalam kegiatan bantuan benih sebanyak 15.510 orang, bantuan calon induk sebanyak 2.940 orang, bantuan KBRL sebanyak 1.980 orang, bantuan KJA HDPE sebanyak 1.320 orang, bantuan UPR sebanyak 520 orang, dan bantuan jaring sebanyak 450 orang.

Kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka mendukung realisasi tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan perbenihan ikan pada Direktorat Perbenihan tahun 2023 antara lain penetapan peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Bantuan, kegiatan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan, pelaksanaan pengadaan dan distribusi bantuan, sehingga bantuan dapat diterima dan banyak tenaga kerja yang akan terlibat dalam kegiatan pengelolaan pembenihan.

Beberapa kegiatan bantuan dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan yaitu bantuan KJA dan bantuan Jaring, sementara bantuan yang dilaksanakan oleh UPT diantaranya kegiatan bantuan calon induk dan bantuan benih. Selain itu, bantuan KBRL dan UPR dilakukan oleh Direktorat Perbenihan dan UPT.

SASARAN KEGIATAN 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan

IKU 1 : Persentase Bantuan Prasarana Budi Daya Laut yang Disalurkan

Indikator kinerja ini merupakan pelaksanaan kegiatan bantuan keramba jaring apung (KJA) dan bantuan jaring yang disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan. Persentase ini diukur berdasarkan jumlah kelompok yang menerima bantuan KJA dan jaring dibandingkan dengan jumlah kelompok yang telah diverifikasi.

Tabel 6. Persentase Penerima Bantuan Prasarana Budidaya Laut yang Disalurkan Tahun 2023

Sasaran Strategis : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Indikator Kinerja : Persentase Penerima Bantuan Prasarana Budidaya Laut yang Disalurkan									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	75 %	96,54%	128,72%	-	-

Capaian Persentase unit Bantuan Prasarana Budi Daya Laut (KJA dan Jaring) yang tersalurkan yakni 96,54% atau sebanyak 753 unit yang terdiri dari 163 unit KJA HDPE dan 590 unit Jaring dari 780 unit yang diusulkan dari proposal yang terverifikasi pada tahun 2023 sebagaimana Tabel. Kelompok penerima KJA dan Jaring berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Hal ini untuk mendukung program Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN), Kampung Perikanan Budi Daya (KPB), dan sentra perikanan budi daya lainnya.

Realisasi anggaran Bantuan KJA HDPE dan Jaring KJA dari Direktorat Perbenihan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pagu anggaran KJA dan Jaring sebesar Rp. 29.823.958.000,-

2. Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 29.823.958.000,- atau sebesar 100 %.

Rencana aksi atas capaian tahun 2023 sudah terlaksana, yaitu terdistribusinya bantuan sarana budidaya laut berupa keramba jaring apung dan jaring kepada pembudidaya ikan dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya.

Rekomendasi atas rencana aksi tahun 2023, antara lain: (1) dilakukan monitoring berkala yang dibantu Dinas Perikanan kabupaten/kota yang kemudian dapat diteruskan ke pusat; dan (2) agar dapat dilakukan evaluasi berkala terkait hasil produksi dan proses yang berlangsung di lapangan.

IKU 2 : Persentase Bantuan Sarana Unit Pembenihan yang Disalurkan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program terobosan yang bergerak pada sektor perikanan budi daya yaitu Pembangunan Kampung Perikanan Budidaya di beberapa lokasi, bantuan sarana unit pembenihan dilakukan untuk peningkatan produksi khususnya ketersediaan benih ikan bermutu. Saat ini, unit pembenihan skala mikro dan kecil atau unit pembenihan rakyat (UPR) yang berkembang di masyarakat adalah unit pembenihan yang memproduksi benih ikan air tawar. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan benih ikan bermutu, kualitas dan kuantitas unit pembenihan perlu ditingkatkan.

Tabel 7. Capaian indikator kinerja bantuan sarana unit pembenihan yang disalurkan tahun 2023.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Indikator Kinerja : Bantuan Sarana unit pembenihan yang disalurkan									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	140 %	75 %	100 %	133,33%	-	-

Pelaksanaan bantuan sarana UPR sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Sarana Unit Pembenihan Rakyat TA 2023 No. 53 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Perikanan Budidaya No.350 Tahun 2022

tentang Pertunjuk Teknis Bantuan Sarana Unit Pembenihan Rakyat TA 2023. Bantuan sarana UPR TA 2023 diberikan dalam bentuk barang dengan menu yang dapat dipilih, antara lain: (a) induk dan pakan (induk ikan, pakan induk, dan/ atau pakan benih); dan (b) peralatan pendukung.

Sebanyak 42 paket bantuan yang tersebar di 22 Kabupaten/ Kota telah disalurkan kepada kelompok penerima. Wilayah dalam penyaluran bantuan sarana UPR diprioritaskan pada lokasi Kampung Perikanan Budidaya yaitu: Kota Binjai, Deli Serdang, Agam, Kota Pariaman, Kota Bengkulu, Kepahiang, Banyuasin, Kota Prabumulih, Kuantan Singingi, Kota Sungai Penuh, Pringsewu, Lampung Barat, Mesuji, Cianjur, Ciamis, Boyolali, Magelang, Banjarnegara, Banyumas, Kediri, Lombok Tengah, dan Mempawah, untuk pembenihan ikan air tawar seperti ikan mas, ikan nila, ikan patin, ikan lele, ikan gurami dan ikan lokal yaitu ikan semah.

Pada periode tahun 2023, realisasi fisik dan anggaran bantuan sarana UPR yang disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Manfaat bantuan sarana UPR telah dirasakan oleh kelompok penerima bantuan, seperti:

- 1) Tersedianya induk unggul bagi kelompok untuk memproduksi benih ikan yang bermutu;
- 2) Meningkatkan produktivitas usaha pembenihan pada masing-masing kelompok;
- 3) Tersedianya benih bermutu bagi pengembangan budidaya pada Kampung Perikanan Budidaya (KPB)



Gambar 9. Jenis bantuan sarana UPR

Indikator kinerja ini merupakan salah satu kegiatan prioritas DJPB dalam mendukung kampung perikanan budi daya, maka kegiatan ini sangat dibutuhkan bagi daerah dalam upaya mewujudkan sumber benih bermutu bagi para pembudidaya. Dalam pelaksanaannya, telah berjalan dengan baik dimana seluruh bantuan sarana UPR telah terdistribusi dan dimanfaatkan pembudidaya.

Rencana aksi atas hasil capaian tahun 2023, diharapkan pemerintah daerah melakukan monitoring serta pelaporan perkembangan unit pembenihan penerima bantuan agar dapat dimanfaatkan oleh para pembenih, sehingga kebutuhan benih bermutu di kampung perikanan budidaya dapat terpenuhi. Disamping itu, rencana tindak lanjut tahun 2024, yaitu:

- i. Monitoring pelaksanaan bantuan sarana UPR
- ii. Lanjutan bantuan sarana UPR tahun 2024 akan dilaksanakan oleh UPT

IKU 3 : Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan

Indikator kinerja ini merupakan persentase bantuan sarana kebun bibit rumput laut (KBRL) yang disalurkan kepada kelompok pembudidaya rumput laut. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah menstimulus kegiatan pembudidayaan rumput laut dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya. Persentase ini diukur berdasarkan jumlah kelompok yang menerima bantuan sarana kebun bibit rumput laut dibandingkan dengan jumlah kelompok yang telah diverifikasi. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Kegiatan Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) tahun 2023 dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan dan lingkup UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang mendapat penugasan bantuan KBRL, antara lain BBPBAP Jepara, BBPBL Lampung, BPBAP Situbondo, BPBL Lombok, BPBL Ambon, BPBAP Takalar, dan BPBL Batam. Alokasi bantuan yang rencana disalurkan oleh Direktorat Perbenihan sebanyak 112 unit dan akan dilaksanakan dalam 3 tahap mengalami perubahan dengan adanya kebijakan pengalokasian anggaran untuk kegiatan prioritas lainnya. Jumlah paket yang disalurkan dari 112 unit menjadi 72 unit dengan 2 tahap pelaksanaan. Tahap 1 sebanyak 36 unit ke 4 kabupaten yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan tahap 2 sebanyak 36 unit ke Kabupaten Wakatobi.

BBPBAP Jepara telah mendistribusikan 5 unit kepada 2 kelompok di Kabupaten Jepara. BBPBL Lampung mengalokasikan 20 unit ke 4 kabupaten yaitu DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau dan Lampung dan telah terdistribusi sebanyak 20 unit ke 16 kelompok. BPBAP Situbondo mengalokasikan 15 unit ke 4 kabupaten yaitu, Sumenep, Situbondo, Banyuwangi dan Buleleng serta telah terdistribusi. BPBL Lombok mengalokasikan 15 unit ke 9 kabupaten, yaitu Klungkung, Sumbawa Besar, Dompu, Bima, Sumba Timur, Rote Ndao, Lembata dan Sikka dan telah terdistribusi semuanya. BPBL Ambon mengalokasikan 46 unit ke 12 kabupaten, dan telah terdistribusi semuanya. BPBAP Takalar mengalokasikan 35 unit ke 6 kabupaten, yaitu Takalar, Wajo, Luwu, Bulukumba, Bone dan Mamuju dan telah terdistribusi. BPBL Batam mengalokasikan 8 unit ke 2 kabupaten yaitu Karimun dan Lingga, dimana sudah dilakukan distribusi 8 unit ke 6 kelompok.

Tabel 8. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan

Sasaran Strategis : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Indikator Kinerja : Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	75 %	100 %	133,33%	-	-

Seperti terlihat pada tabel bahwa pada tahun 2023, realisasi bantuan KBRL di tahun 2023 sebesar 100% dari target tahunan 75%. Realisasi dihitung berdasarkan jumlah unit KBRL yang disalurkan dibandingkan dengan jumlah unit KBRL yang diusulkan dari proposal yang telah diverifikasi. Sampai dengan akhir tahun 2023 dari target sebesar 216 unit telah dilakukan verifikasi dan telah terdistribusikan semuanya. Sehingga realisasi bantuan kebun bibit rumput laut telah tercapai sebesar 100%.

Persoalan dalam pencapaian IKU antara lain lokasi pemesanan sarana bantuan KBRL dengan lokasi distribusi yang jauh sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pengiriman. Keterbatasan ekspedisi untuk melakukan pendistribusian juga menjadi salah satu kendala dan pendistribusian bantuan.

Realisasi anggaran Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan kepada Kelompok Pembudidaya Rumput Laut pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pagu anggaran Bantuan KBRL sebesar Rp. 8.830.856.400,-
2. Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 8.830.856.400,- atau sebesar 100%.

IKU 4 : Persentase Pusat Produksi Benih dan Induk yang Operasional

Pusat produksi benih dan induk dibangun di 3 (tiga) lokasi, yaitu Kab Mesuji (Prov. Lampung), Kab Musirawas (Prov. Sumatera Selatan), dan Kab Dharmasraya (Prov. Sumatera Barat).

a) Kab Mesuji

Pada tahun 2023, Direktorat Perbenihan mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk yang terletak di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

b) Kab Musirawas dan Kab Dharmasraya

Pada tahun 2023, BPBAT Sungai Gelam-Jambi mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan lahan *Broodstock Center* (BC) yang terletak di

Desa Babat, Kecamatan STL Terawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, serta di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 9. Capaian indikator kinerja pusat produksi benih dan induk yang operasional

Sasaran Strategis : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Indikator Kinerja : Pusat Produksi Benih dan Induk yang Operasional									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	40 %	55 %	137%	-	-

i. Kabupaten Mesuji

Kegiatan yang telah dilaksanakan di Pusat Produksi Benih dan Induk di Mesuji, yaitu:

- a. Penandatanganan kontrak pekerjaan tambahan pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk sudah dilaksanakan
- b. Serah terima hasil pekerjaan pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk, serta prasarana tambahan telah selesai dilaksanakan
- c. Uji coba pengisian air pada kolam filter, kolam tandon, kolam fiber, akuarium, dan kolam bundar telah dilaksanakan
- d. Monitoring, evaluasi, dan supervisi pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk sudah dilaksanakan
- e. Sudah dilakukan serah terima pengelolaan kepada BBPBAT Sukabumi
- f. Telah terbit rekomendasi teknis penggunaan sumber air dari Waduk Buko Poso yang diterbitkan oleh BBWS Mesuji-Sekampung Kementerian PUPR
- g. Telah terbit persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang PKKPR, sertifikat standar, dan NIB dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Mesuji

Indikator kinerja yang sudah dicapai pada pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk Mesuji tahun 2023, yaitu: memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, unit pendederan benih) namun belum melakukan pemeliharaan, karena tahun 2023 masih proses pembangunan tahap pertama dari 5 tahun rencana pembangunan

Capaian realisasi Pusat Produksi Benih dan Induk sebesar 15% karena pada tahun 2023 baru dilakukan pembangunan fisik, belum ada kegiatan pemeliharaan dan produksi benih



Gambar 10. Kolam Tandon Penampungan Air

ii. Kabupaten Musirawas

Broodstock Center (BC) Musirawas sudah mulai digunakan untuk produksi induk ikan Nila Hitam dan Nila Merah, uji coba awal dilakukan pada tahun 2022 dengan konstruksi kolam bulat diameter 8 meter

Pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran biaya sebesar 5 (lima) miliar rupiah. Alokasi anggaran Pembangunan BC Musirawas diprioritaskan untuk penambahan fasilitas kegiatan produksi dan diharapkan dapat mendukung aktivitas produksi calon induk dan benih yang dapat mengcover wilayah Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu. Kegiatan pembangunan fisik tahun 2023 sudah terealisasi 100%

Indikator kinerja yang sudah dicapai di BC Musirawas, yaitu: (a) Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, unit pendederan benih) dan sudah terdapat proses pemeliharaan induk/benih; (b) Memiliki sarana produksi minimal dan mampu produksi benih; (c) Memiliki sarana produksi dan sarana pendukung berupa gudang pakan/ peralatan serta biosekuriti yang baik dan mampu produksi benih; dan (d) Memiliki sarana produksi, sarana pendukung, serta sarana biosekuriti lengkap dan mampu memproduksi benih/calon induk, serta telah menerapkan prinsip-prinsip CPIB.

BC Musirawas telah mampu memproduksi benih dan menerapkan prinsip-prinsip CPIB, maka realisasi yang diperoleh adalah 75%.



Gambar 11. Bak Pemberokan Ikan di Broodstock Center Kab Musirawas

iii. Kabupaten Dharmasraya

Progress di Broodstock Center Kab Dharmasraya tahun 2023, yaitu kegiatan pembangunan fisik yang sudah terealisasi 100%. Indikator kinerja yang sudah dicapai di BC Dharmasraya, yaitu: (a) Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, unit pendederan benih) dan sudah terdapat proses pemeliharaan induk/benih; (b) Memiliki sarana produksi minimal dan mampu produksi benih; (c) Memiliki sarana produksi dan sarana pendukung berupa gudang pakan/ peralatan serta biosekuriti yang baik dan mampu produksi benih; dan (d) Memiliki sarana produksi, sarana pendukung, serta sarana biosekuriti lengkap dan mampu memproduksi benih/calon induk, serta telah menerapkan prinsip-prinsip CPIB. BC Dharmasraya telah mampu memproduksi benih dan menerapkan prinsip-prinsip CPIB, maka realisasi yang diperoleh adalah 75%.



Gambar 12. Bak Pemberokan Ikan di Broodstock Center Kab Dharmasraya

a. Anggaran dan Realisasi

i. Kab Mesuji

Alokasi anggaran kegiatan pusat produksi benih dan induk yang dikembangkan di Kab Mesuji sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.999.087.893,-.

ii. Kab Musirawas dan Kab Dharmasraya

Total anggaran pembangunan BC di Kab Musirawas dan Kab Dharmasraya sebesar Rp. 6.000.000.000 dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 5.999.742.689. Rincian per masing-masing lokasi adalah sebagai berikut:

- Total anggaran pembangunan BC di Kab Musirawas sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 4.999.841.758.
- Total anggaran pembangunan BC di Kab Dharmasraya sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 999.900.931.

b. Permasalahan Pencapaian IKU

i. Kab Mesuji

Permasalahan yang dihadapi selama kegiatan pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk di Kab Mesuji, diantaranya:

- Unsur pelaksana kegiatan melibatkan pihak ke-3 (penyedia jasa), lintas sektor eksternal KKP dan unit kerja di Pemerintah Daerah
- Pembangunan harus terlebih dahulu dilaksanakan *land clearing*
- Musim kemarau panjang sehingga menyebabkan pengisian air dari waduk ke kolam belum dilakukan secara alami

ii. Kab Musirawas

Permasalahan yang dihadapi selama kegiatan pembangunan BC di Kab Musirawas, diantaranya:

- Permasalah teknis pembangunan BC Musirawas adalah kondisi lahan masih terdapat tutupan vegetasi pohon karet dan tanaman liar lainnya, sehingga proses pembangunan harus terlebih dahulu dilakukan *land clearing*. Hal ini menjadi pertimbangan dalam setiap perencanaan dan menimbulkan tambahan biaya pembangunan (lebih mahal) persatuan bangunan yang akan dibuat. Kondisi lahan

juga masih berbatasan dengan lahan warga, belum ada pagar pembatas.

- Alokasi anggaran yang terbatas mengakibatkan proses pembangunan BC Musirawas berjalan lambat, sementara nilai bahan dan upah cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini mengakibatkan total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan seluruh rencana fasilitas dan sarana prasarana produksi menjadi semakin mahal.

iii. Kab Dharmasraya

Permasalahan yang dihadapi selama kegiatan pembangunan BC di Kab Dharmasraya, diantaranya:

- Permasalah teknis pembangunan BC Dharmasraya adalah kondisi tanah rawa dan relatif lebih rendah dari jalan yang dijadikan jalur utama, sehingga proses pembuatan bangunan harus terlebih dahulu dilakukan penimbunan, untuk menghindari banjir dan resiko lainnya. Hal ini menimbulkan peningkatan biaya pembangunan (lebih mahal) persatuan bangunan yang akan dibuat.
- Pada saat awal pembuatan kolam budidaya tahun 2018 – 2020, Saluran inlet dan outlet tidak bisa dibuat bersamaan dengan pembuatan kolam, dikarenakan kondisi tanah timbunan dari lokasi cenderung lembek sehingga perlu dilakukan pengeringan dan pengerasan tanah terlebih dahulu. Dampaknya inlet dan outlet kolam tidak tersedia bersamaan dengan pembuatan kolam.
- Alokasi anggaran yang terbatas mengakibatkan proses pembangunan BC Dhramasraya berjalan lambat, sementara nilai bahan dan upah cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini mengakibatkan total anggaran yang dibutuhkan untuk Pembangunan seluruh rencana fasilitas dan sarana prasarana produksi menjadi semakin mahal.

c. Rencana Aksi pada Tahun 2024

i. Kab Mesuji

Rencana tindak lanjut tahun 2024 untuk pusat produksi benih dan induk di Kab Mesuji, adalah proses perencanaan pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk untuk tahun anggaran 2024, serta melakukan

pembangunan lanjutan dan pengelolaan yang akan dilakukan oleh BBPBAT Sukabumi.

ii. Kab Musirawas

Rencana tindak lanjut tahun 2024 di Kab Musirawas adalah atas dasar pertimbangan teknis, pada tahun 2024 prioritas alokasi anggaran untuk pembangunan adalah pembuatan perkolaman, fasilitas pendukung dan pengamanan aset. Pengamanan aset bisa dilakukan dengan pembuatan parit keliling sebagai batas lahan.

iii. Kab Dharmasraya

Rencana tindak lanjut tahun 2024 di Kab Dharmasraya adalah atas dasar pertimbangan teknis, pada tahun 2024 prioritas alokasi anggaran untuk pembangunan adalah pembuatan saluran inlet dan outlet perkolaman, agar kolam budidaya bisa dioperasikan secara optimal. Kondisi tanah yang lebih rendah dari jalan harus diantisipasi dengan menganggarkan penimbunan lahan terlebih dahulu jika dialokasikan didirikan bangunan, atau pengerasan untuk bisa dibangun pada tahun berikutnya.

IKU 5. Persentase bantuan benih yang disalurkan

Bantuan benih merupakan salah satu program prioritas pada tahun 2023. Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPB ditargetkan untuk memproduksi benih bermutu yang akan disalurkan kepada masyarakat atau unit pembenihan sebagai calon penerima bantuan dengan hasil capaian seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 10. Capaian indikator kinerja persentase bantuan benih yang disalurkan

Sasaran Strategis : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Indikator Kinerja : Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	222,93	-	-	75 %	114,08 %	152%	-	-

a. Analisa

Bantuan benih bermutu ikan air tawar, payau, dan laut yang dihasilkan UPT dan didistribusikan ke masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah

untuk membantu para pembudi daya skala kecil dan mikro untuk meningkatkan hasil produksi. Selain itu, bantuan benih ke masyarakat juga untuk *restocking* ikan lokal di perairan umum dengan tujuan untuk menjaga sumberdaya genetik dan pemanfaatan produktivitas perairan umum, sehingga berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran bantuan benih kepada masyarakat telah dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Benih Ikan pada DJPB Tahun 2023 (Peraturan Dirjen Perikanan Budidaya No. 308 Tahun 2022). Bantuan benih yang telah tersalurkan berdasarkan usulan masyarakat dari 14 (empat belas) UPT sebanyak 123.033.337 ekor benih ikan air tawar, payau, dan laut.

Tabel 11. Realisasi Bantuan Benih dan Restocking Tahun 2023

No	UPT DJPB	Benih yang Terverifikasi (Ekor)	Benih yang Terdistribusi (Ekor)			Total Benih yang Terdistribusi (Ekor)	Persentase (%)
			Tawar	Payau	Laut		
1	BBPBAT SUKABUMI	7.166.612	9.543.000			9.543.000	133,16
2	BPBAT SEI GELAM	5.695.000	5.745.300			5.745.300	100,88
3	BPBAT MANDIANGIN	2.706.421	4.416.400			4.416.400	163,18
4	BPBAT TATELU	2.258.829	3.836.000			3.836.000	169,82
5	BBPBAP JEPARA	21.823.101		22.510.776		22.510.776	103,15
6	BPBAP UJUNG BATEE	8.275.400	800.000	7.681.510	347.200	8.828.710	106,69
7	BPBAP SITUBONDO	12.158.411		13.617.000	140.480	13.757.480	113,15
8	BPBAP TAKALAR	21.497.089	28.000	22.207.000	81.000	22.316.000	103,81
9	BBPBL LAMPUNG	641.122			719.500	719.500	112,23
10	BPBL AMBON	557.658			658.000	658.000	117,99
11	BPBL BATAM	571.177			571.900	571.900	100,13
12	BPBL LOMBOK	863.422	330.636		671.600	1.002.236	116,08
13	BPIUUK KARANGASEM	21.171.166		25.450.000	310.000	25.760.000	121,67
14	BLUPPB KARAWANG	2.478.373	2.472.535	855.000	40.500	3.368.035	135,90
	Jumlah	107.863.781	27.171.871	92.321.286	3.540.180	123.033.337	114,06

b. Anggaran dan Realisasi

Realisasi anggaran tahun 2023 untuk bantuan benih yang tersalurkan berdasarkan usulan masyarakat sebesar Rp. 14.568.861.176,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 24.036.520.000,-

c. Permasalahan Pencapaian IKU

Permasalahan yang dihadapi selama kegiatan bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat, diantaranya:

- Perubahan musim dan cuaca menyebabkan produktivitas induk kurang optimal dalam memijah, memproduksi telur/larva
- Sebaran lokasi sangat luas jangkauannya, jauh dari lokasi UPT sumber produksi benih

d. Rencana Aksi pada Tahun 2024

Rencana aksi atas hasil capaian tahun 2023, antara lain:

- Agar pelaksanaan kegiatan tetap berpedoman pada Juknis Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2024,
- Meningkatkan koordinasi antar unit kerja pelaksana kegiatan
- Satker DJPB yang melakukan penyaluran agar tetap konsisten terhadap target yang telah ditetapkan agar pencapaian penyaluran dapat berjalan dengan lancar,
- Melakukan monitoring serta pelaporan secara rutin terkait bantuan benih ikan air tawar, payau, dan laut.

IKU 6 : Persentase bantuan calon induk yang disalurkan

Indikator kinerja ini merupakan kegiatan berupa bantuan calon induk ikan air tawar, payau, dan laut yang disalurkan kepada masyarakat atau kelompok pembudidaya ikan. Persentase capaian diukur berdasarkan jumlah bantuan calon induk yang diterima dibandingkan dengan jumlah bantuan calon induk yang telah diverifikasi.

Tabel 12. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Strategis : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Indikator Kinerja : Persentase bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	75 %	203,43 %	271,43%	-	-

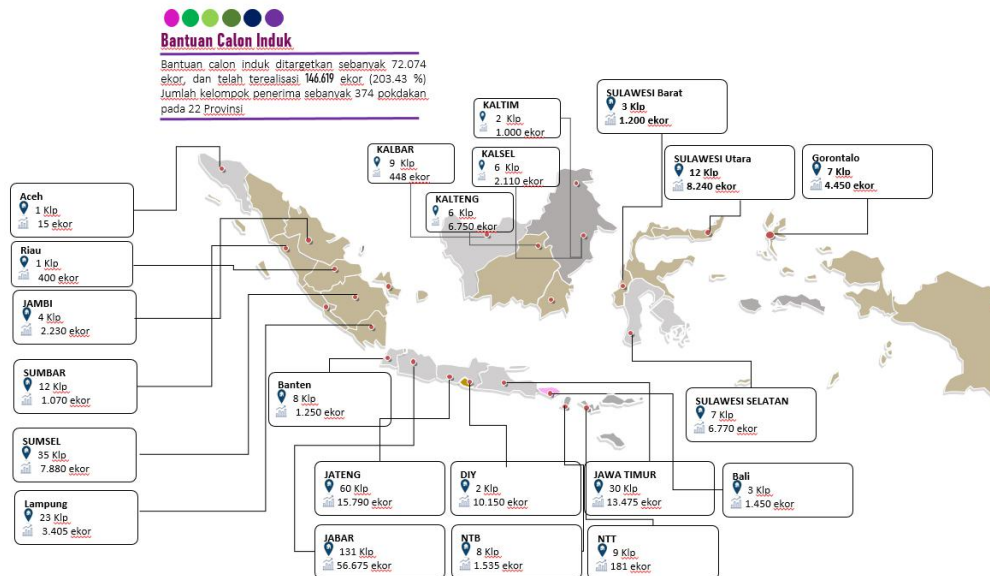
a. Analisa

Kegiatan bantuan calon induk dilaksanakan oleh 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang memiliki tugas dan fungsi memproduksi calon induk ikan air tawar, payau, dan laut. Target bantuan calon induk yang telah ditetapkan pada tahun 2023 adalah 72.074 ekor. Jenis calon induk ikan yang dibantukan antara lain ikan nila, lele, mas, patin, papuyu, nilem, gabus haruan, udang vanname, bandeng, kakap putih, dan bawal bintang.

Selama periode Oktober - Desember 2023 telah terdistribusi sebanyak 70.903 ekor calon induk. Sehingga secara keseluruhan realisasi bantuan calon induk yang telah terdistribusi pada tahun 2023 adalah sebanyak 146.619 ekor. Rincian bantuan calon induk pada setiap UPT tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 13. Realisasi bantuan calon induk tahun 2023

No	UPT Pusat	Calin yang Terverifikasi (Ekor)	Tawar	Payau	Laut	Calin yang Terdistribusi (Ekor)	Presentase (%)
1	BBPBAT Sukabumi	13.565	83.430			83.430	615,04
2	BPBAT Sungai Gelam	12.000	13.385			13.385	111,54
3	BPBAT Tatelu	10.000	12.890			12.890	128,90
4	BPBAT Mandiangin	11.000	11.708			11.708	106,44
5	BBPBAP Jepara	4.180		210		210	5,02
6	BPBAP Situbondo	2.429		2.500		2.500	102,92
7	BPBAP Ujung Batee	1.550			4.015	4.015	259,03
8	BPBAP Takalar	4.550		3.770		3.770	82,86
9	BBPBL Lampung	60		-		-	-
10	BPBL Batam	30		-		-	-
11	BPBL Lombok	1.040	1.196	-	50	1.246	119,81
12	BPBL Ambon	40		-		-	-
13	BPIUUK Karangasem	6.000		7.800		7.800	130,00
14	BLUPPB Karawang	5.630	5.665	-	-	5.665	100,62
JUMLAH		72.074	128.274	14.280	4.065	146.619	203,43



Gambar 13. Peta sebaran bantuan calon induk tahun 2023

a. Anggaran dan Realisasi

Anggaran kegiatan bantuan calon induk yang dilaksanakan oleh UPT DJPB adalah sebesar Rp. 2.968.394.000,-. Sampai dengan akhir periode tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 2.935.101.994,- atau sebesar 98,88%.

b. Permasalahan pencapaian IKU

Indikator Kinerja Bantuan Calon Induk Ikan ini merupakan kegiatan prioritas DJPB dalam mendukung kampung perikanan budidaya, sehingga keberlanjutan kegiatan bantuan calon induk ikan masih bisa dipertahankan ke depan. Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dapat diatasi sehingga target dapat dicapai.

c. Rencana Aksi

Kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan bantuan calon induk ikan ini perlu dilakukan. Pemerintah daerah bersama dengan UPT pelaksana bantuan perlu memantau keberhasilan program ini.

IKU 7 : Produksi Calon Induk di UPT

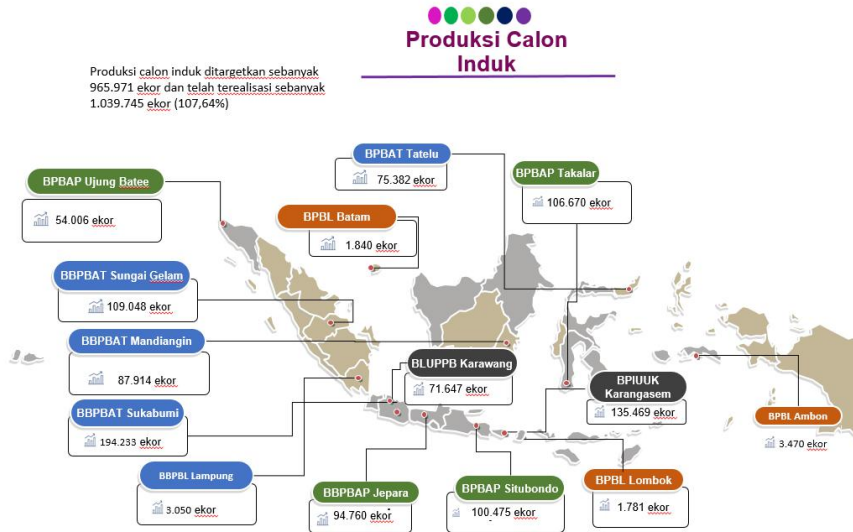
Indikator kinerja ini merupakan kegiatan berupa bantuan calon induk ikan air tawar, payau, dan laut yang disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan. Persentase capaian diukur berdasarkan jumlah bantuan calon induk yang diterima dibandingkan dengan jumlah bantuan calon induk yang telah dibenarkan.

Tabel 14. Produksi Calon Induk yang Dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Indikator Kinerja : Produksi Calon Induk Yang dilaksanakan oleh UPT Lingkup Ditjen PB									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
1.200.000	1.110.000	-	-	721.573	965.971	1.039.745	107,63%	1.000.000	103,97%

a. Analisa

Penyediaan induk unggul menjadi salah satu tugas pokok bagi unit pelaksana teknis di bawah DJPB. Melalui produksi ini, diharapkan akan memastikan ketersediaan benih bermutu. Pada tahun anggaran 2023, sebanyak 965.971 ekor calon induk menjadi target produksi bagi UPT lingkup DJPB. Komoditas yang diproduksi sebagai calon induk, terdiri atas beberapa spesies. Pada komoditas ikan air tawar seperti ikan mas, nila, lele, patin, gurami, serta ikan-ikan lokal lainnya. Komoditas ikan air payau, diantaranya adalah udang vanname, udang windu, bandeng, dan kepiting. Sedangkan untuk komoditas ikan laut antara lain kerapu, kakap putih, bawal bintang, bubara dan kobia



Gambar 14. Peta sebaran produksi calon induk di UPT DJPB tahun 2023

Kegiatan produksi calon induk di UPT lingkup DJPB sampai pada akhir Tahun 2023 telah mampu menghasilkan produksi calon induk sebanyak 1.039.745 ekor atau 107,63% dari target. Adapun rinciannya adalah produksi calon induk ikan air tawar 489.854 ekor, calon induk ikan air payau 536.077 ekor, dan calon induk ikan laut 13.814 ekor.

Realisasi keuangan tahun 2023 untuk kegiatan produksi induk unggul adalah sebesar Rp. 36.622.998.004,-

b. Permasalahan Pencapaian IKU

Kegiatan produksi unggul bertujuan memproduksi induk yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan benih-benih ikan yang bermutu. Beberapa kendala dalam pencapaian indicator kinerja ini dapat teratasi dengan baik sehingga capaian IKU dapat terealisasi.

c. Rencana Aksi

Rencana aksi atas hasil capaian indikator kinerja ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait bagaimana pemanfaatan induk-induk yang diproduksi di UPT. Selain itu, diharapkan kegiatan produksi induk di tahun 2024 tetap terlaksana sehingga dapat memastikan ketersediaan induk unggul di masyarakat.

IKU 8. Produksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala *Intermediate* di Unit Pelaksana Teknis

Indikator kinerja ini merupakan jumlah planlet yang diproduksi di Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut oleh 6 (enam) UPT, yaitu BBPBL Lampung, BBPBAP Jepara, BPBL Lombok, BPBL Ambon, BPBAP Situbondo dan BPBAP Takalar. Planlet adalah bibit rumput laut muda (hasil dari pembesaran dari mikropropagul) di Laboratorium Kultur Jaringan. Satu Individu planlet adalah rumput laut muda dengan ukuran 2 – 3 buah thallus yang berukuran 2 – 3 cm dengan berat sekitar 0,2 – 0,3 gr per individu.

Tabel 15. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT

Sasaran Strategis : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Indikator Kinerja : Produksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala <i>Intermediate</i>									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	18.000	29.645	164,7%	-	-

Capaian Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate tahun 2023 sebanyak 29.645 planlet atau tercapai 164,7% dari target 18.000 sebagaimana terlihat dari Tabel diatas.

Besarnya capaian jumlah produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate adalah akumulasi dari jumlah produksi UPT sebagai berikut : BBPBL Lampung sebanyak 4.282 planlet, BBPBAP Jepara sebanyak 3.000 Planlet, BPBL Ambon sebanyak 8.736 planlet, BPBL Lombok sebanyak 3.132 planlet, BPBAP Situbondo sebanyak 5.275 planlet, BPBAP Takalar sebanyak 5.220 planlet. Target produksi planlet masing-masing UPT sebanyak 3.000 individu.

Total realisasi anggaran produksi planlet kultur jaringan rumput laut di UPT tahun 2023 sebesar Rp2.802.407.528,- atau 100,09% dari pagu anggaran Rp. 2.800.000.000,- dengan rincian realisasi masing-masing UPT sebagai berikut :

- a. BBPBL Lampung telah terealisasi sebesar Rp. 499.766.006,- (99,95%) dari pagu anggaran Rp. 500.000.000,-.
- b. BBPBAP Jepara telah terealisasi sebesar Rp. 300.000.000,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 300.000.000,-. Anggaran senilai Rp.200.000.000,- dialihkan ke kegiatan kepiting.
- c. BPBL Lombok telah terealisasi sebesar Rp. 502.871.245,- (100,57%) dari pagu anggaran Rp. 500.000.000,-.
- d. BPBL Ambon telah terealisasi sebesar Rp. 499.739.376,- (99,95%) dari pagu anggaran Rp. 500.000.000,-.
- e. BPBAP Takalar telah terealisasi sebesar Rp. 498.455.331,- (99,69%) dari pagu anggaran Rp. 500.000.000,-.
- f. BPBAP Situbondo telah terealisasi sebesar Rp. 501.575.570,- (100,32%) dari pagu anggaran Rp. 500.000.000,-.

Rekomendasi rencana aksi atas capaian di tahun 2023 adalah : (1) Agar UPT dapat meningkatkan produksi planlet; dan (2) dapat dilakukan idenifikasi kendala teknis dan solusi untuk peningkatan produksi planlet di tahun 2024.

IKU 9 : Persentase Keberhasilan Unit Pelaksana Teknis yang Mengembangkan Pembenihan pada Komoditas Lobster dan Kepiting

Indikator kinerja ini mengukur hasil keberhasilan UPT lingkup DJPB dalam menghasilkan paket percontohan teknologi pembenihan pada komoditas unggulan lobster dan kepiting/ rajungan yang diselesaikan sampai 100%. Tingkat keberhasilan untuk teknologi pembenihan lobster adalah jika mampu memijahkan dan memelihara larva lobster minimal hingga mencapai fase *phylosoma*. Sedangkan, tingkat keberhasilan untuk teknologi pembenihan kepiting dan rajungan jika mampu memijahkan dan memelihara benih hingga mencapai tingkat kelangsungan hidup sebesar minimal 5% dengan ukuran crablet 1 cm. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pengukuran indikator kinerja dilakukan tahunan.

Kegiatan pembenihan lobster dikembangkan di BBPBL Lampung, BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBL Lombok, BPBL Ambon dan BPBAP

Takalar. Kegiatan pembenihan Kepiting dilaksanakan oleh BBPBAP Jepara, sedangkan pembenihan rajungan oleh BPBAP Takalar.

Tabel 16. Persentase Keberhasilan Unit Pelaksana Teknis yang Mengembangkan Pembenihan pada Komoditas Lobster dan Kepiting

Sasaran Strategis : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Indikator Kinerja : Persentase Keberhasilan Unit Pelaksana Teknis yang Mengembangkan Pembenihan pada Komoditas Lobster dan Kepiting									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-

Perkembangan kegiatan teknologi pembenihan lobster di UPT pada tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. BBPBAP Jepara berhasil memelihara *phylosoma* sampai hari ke 30.
2. BBPBL Lampung berhasil memelihara *phylosoma* sampai hari ke 36.
3. BPBL Lombok berhasil memelihara *phylosoma* sampai hari ke 9.
4. BPBAP Takalar berhasil memelihara *phylosoma* sampai hari ke 21.
5. BPBAP Situbondo berhasil memelihara *phylosoma* sampai hari ke 32.
6. BPBL Ambon berhasil memelihara *phylosoma* sampai hari ke 25.

Semua UPT telah berhasil memelihara *phylosoma* dan telah memenuhi tingkat keberhasilan yang ditentukan.

Persoalan yang dihadapi oleh UPT yang melaksanakan pengembangan teknologi budidaya lobster antara lain belum menemukan teknik pemeliharaan larva lobster yang tepat agar bertahan hidup seperti pengelolaan/ manajemen kualitas air yang sesuai, jenis pakan dan frekuensi pemberiannya pada tahap *phylosoma* dan keterbatasan sarana untuk mendukung pembenihan lobster.

Sedangkan untuk kegiatan pengembangan teknologi rajungan, BPBAP Takalar telah mampu menghasilkan crablet 0,5 - 1 cm dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 12%, dan hal ini telah memenuhi tingkat

keberhasilan yang ditentukan. BPBAP Jepara pada TW 3 juga mampu menghasilkan crablet kepiting dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 10%.

Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain mengadakan rapat evaluasi dan diskusi untuk bertukar informasi antar UPT terkait perkembangan progres kegiatan pengembangan teknologi komoditas unggulan.

Realisasi anggaran Keberhasilan Unit Pelaksana Teknis yang Mengembangkan Pembentukan pada Komoditas Lobster dan Kepiting pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. BBPBL Lampung telah terealisasi sebesar Rp. 298.649.880,- (99,55%) dari pagu anggaran Rp. 300.000.000,-.
2. BBPAP Jepara telah terealisasi sebesar Rp. 551.575.402,- (68,95%) dari pagu anggaran Rp. 800.000.000,-.
3. BPBL Lombok telah terealisasi sebesar Rp. 349.632.315,- (99,89%) dari pagu anggaran Rp. 350.000.000,-.
4. BPBAP Takalar telah terealisasi sebesar Rp. 407.112.500,- (98,45%) dari pagu anggaran 413.524.000,-.
5. BPBAP Situbondo telah terealisasi sebesar Rp. 295.125.000 (99,59%) dari pagu anggaran Rp. 295.500.000,-.
6. BPBL Ambon telah terealisasi sebesar Rp. 1.299.552.836,- (99,97%) dari pagu anggaran Rp. 1.300.000.000,-.

IKU 10 : Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun

Indikator ini merupakan jumlah kebijakan yang disusun untuk mendukung kegiatan Direktorat Perbenihan. Rekomendasi kebijakan merupakan butir-butir saran/pemikiran hasil kajian yang disampaikan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan pada Direktorat Perbenihan. Kegiatan yang tertuang dalam rekomendasi kebijakan ini berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan ikan. Dalam pengertian singkatnya, norma adalah aturan atau ketentuan yang

dipakai sebagai tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintah, sedangkan kriteria adalah ukuran yang dipakai menjadi dasar dalam penyelenggaraan. NSPK dapat mempertegas dan memperjelas mekanisme dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Pengukuran capaian indikator rekomendasi kebijakan tata kelola bidang perbenihan ikan dilakukan secara tahunan.

Tabel 17. Capaian IKU Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Perbenihan

Sasaran Strategis : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan									
Indikator Kinerja : Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Perbenihan									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	60%	68,75%	114,58%	70%	98,21%

a. Analisa

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan, sehingga belum dapat dilakukan analisa terhadap capaiannya. Beberapa keluaran atas rekomendasi kebijakan bidang perbenihan yang direncanakan antara lain terkait dengan usulan judul RSNI bidang perbenihan, rancangan Keputusan Menteri terkait Sistem Perbenihan Nasional, rumusan kegiatan jejaring perbenihan, dan usulan hasil penilaian jenis ikan yang akan dibudidayakan.

Sampai akhir tahun 2023, telah tercapai 10 (sepuluh) rekomendasi kebijakan tata kelola bidang perbenihan yang disusun, sebagai berikut :

1. RSNI 3 - Ikan Kobia (*Rachycentron canadum*, Linnaeus 1766) – Bagian 5 : Produksi induk.
2. RSNI 3 - Ikan Kobia (*Rachycentron canadum*, Linnaeus 1766) – Bagian 4 : Induk.
3. RSNI 3 - Ikan mas (*Cyprinus carpio*, Linnaeus 1758) – Bagian induk.
4. RSNI 3 - Ikan mas (*Cyprinus carpio*, Linnaeus 1758) – Bagian 2 : Benih.
5. Kepmen KP nomor 180 tahun 2023 tentang Pelepasan Ikan Patin Pustina

6. Kepmen KP nomor 181 tahun 2023 tentang Pelepasan Udang Vaname Nusa Dewa
7. Kepmen KP nomor 182 tahun 2023 tentang Pelepasan Ikan Nila Sakti
8. Kepmen KP nomor 202 tahun 2023 tentang Pelepasan Ikan Nila Nirwana IV
9. Rancangan Permen KP tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional
10. Hasil rumusan Forum Jejaring Perbenihan Ikan Nasional

Kegiatan Forum Jejaring Perbenihan Ikan Nasional dilaksanakan pada 6-9 Juni 2023 di Golden Boutique Hotel, Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan dinas kelautan dan perikanan provinsi dan kabupaten/kota, UPT DJPB, dan swasta menghasilkan rumusan sebagai berikut:

1. Forum Jejaring Perbenihan sangat diperlukan sebagai wadah pertemuan rutin, untuk koordinasi dan komunikasi para produsen induk dan benih. Sehingga pemenuhan kebutuhan induk unggul dan benih bermutu dapat terpenuhi melalui suatu Jejaring yang terdiri dari para produsen induk dan benih, baik UPT KKP, UPT BRIN, UPTD di Provinsi, UPTD di Kabupaten/Kota, dan Swasta. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jejaring Perbenihan Nasional perlu penyesuaian, khususnya terkait nama nomenklatur anggota jejaring yang sudah berubah, status anggota jejaring yang tidak aktif dan anggota yang akan masuk menjadi anggota jejaring;
2. Pelepasan jenis ikan baru merupakan hal penting untuk mendukung ketersediaan induk unggul. Tata cara pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan.
 - (a) Setiap Jenis Ikan Baru yang akan dibudidayakan harus mendapatkan penetapan pelepasan dari Menteri.
 - (b) Pelepasan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah (pusat atau daerah) dan swasta/non pemerintah.
 - (c) Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan berasal dari:
 - Ikan Hasil Domestikasi;
 - Ikan Hasil Introduksi;
 - Ikan Hasil Pemuliaan; dan
 - Ikan Produk Rekayasa Genetik.

- (d) Untuk mendapatkan penetapan pelepasan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan : naskah akademik; dan usulan nama Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan.
 - (e) Naskah akademik minimal memuat :
 - hasil pengujian
 - penjelasan tentang kesesuaian, keunggulan, dan manfaat
 - kebenaran silsilah deskripsi dan metode
 - (f) Pengujian fenotipe dan pengujian genotipe dilakukan di laboratorium atau fasilitas pengujian yang terakreditasi.
 - (g) Dalam menyusun naskah akademik dan melakukan pengujian, pelaksanaan pelepasan jenis ikan baru dapat didampingi oleh tenaga ahli/pakar di bidang genetik ikan
 - (h) Berdasarkan permohonan penetapan pelepasan jenis ikan baru (pelepasan), Menteri melakukan penilaian melalui Tim Penilai.
 - (i) Tim penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri, dan hasil penilaian berupa : *dapat dilakukan pelepasan; atau tidak dapat dilakukan pelepasan.*
3. Bagi UPTD/ Balai Benih Ikan di Kabupaten/Kota yang akan merencanakan anggaran APBD untuk BBI Komoditas Ikan Laut, maka dapat berkoordinasi terlebih dahulu secara tertulis (Surat) dengan Ditjen Keuangan Daerah dengan mengacu pada aturan mengenai kewenangan Kabupaten/Kota;
4. Alokasi DAK ditetapkan oleh Bappenas, sesuai kriteria penetapan lokus kegiatan dari Bappenas. Mekanisme DAK untuk kegiatan Perbenihan
- (a) Direktorat Perbenihan menyusun menu kegiatan DAK untuk kegiatan di UPTD Perbenihan dan kegiatan Pemberdayaan (Bantuan UPR/HSRT) di Kabupaten/Kota;
 - (b) Direktorat Perbenihan mengusulkan calon lokasi prioritas (lokpri) kegiatan DAK Perbenihan kepada Biro Perencanaan dan Bappenas, berdasarkan lokasi Kampung Perikanan Budidaya, dan berdasarkan proposal/usulan dari daerah;
 - (c) Pembahasan menu DAK dan calon lokpri antara Bappenas dan Biro Perencanaan KKP

- (d) Penetapan menu DAK dan lokpri, serta alokasi anggaran DAK oleh Bappenas
 - (e) Daerah menyusun perencanaan DAK melalui Aplikasi Krisna. Dalam input data usulan kegiatan DAK oleh operator Krisna, sangat diharapkan agar di Provinsi dan Kabupaten/Kota meng-optimalkan menu dan anggaran yang telah dialokasikan
 - (f) Daerah melengkapi usulan DAK dengan KAK, RAB dan data pendukung
 - (g) Asistensi DAK dengan Biro Perencanaan, dan DJPB
 - (h) Perbaiki dokumen usulan DAK
 - (i) Penetapan final alokasi dana dan lokasi DAK di tahun yang akan datang.
5. Badan Riset dan Inovasi Nasional berkomitmen memberikan dukungan terhadap pengembangan induk komoditas unggulan perikanan budidaya (udang, rumput laut, lobster, kepiting dan nila salin serta komoditas lokal) melalui pembentukan “Rumah Program Riset *Aquaculture —BRIIT*’ yang akan berfokus pada kegiatan:
- a. Domestikasi dan pemuliaan ikan konsumsi untuk ketahanan pangan berbasis bioteknologi serta adaptif terhadap perubahan iklim
 - b. Rekayasa lingkungan dan wadah akuakultur berkelanjutan
 - c. Pengelolaan limbah budidaya ikan berbasis nirlimbah (zero waste) dan perubahan
 - d. Teknologi pakan ramah lingkungan dan kesehatan ikan konsumsi
 - e. Kegiatan pemuliaan perlu dilakukan untuk peremajaan atau menghasilkan induk unggul dan benih bermutu yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat. Feed back dari pengguna/masyarakat atas produk pemuliaan yang diproduksi diperlukan untuk mengetahui performa dan peningkatan kualitas.
 - f. Pemberdayaan UPTD dan dukungan dari stakeholder/swasta diperlukan untuk memenuhi kebutuhan induk dan benih di masyarakat.
- b. Anggaran dan Realisasi
- Pada tahun anggaran 2023, Direktorat Perbenihan menargetkan sebanyak 9 (sembilan) rekomendasi kebijakan, dengan dukungan anggaran awal sebesar

Rp. 1.620.000.000,-. Namun dengan adanya kebijakan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*), terdapat pengurangan anggaran, sehingga anggaran tersedia saat ini adalah Rp. 1.081.505.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi anggaran pada indikator ini adalah Rp. 1.079.310.700,- atau 99,80%.

c. Permasalahan pencapaian IKU

Pencapaian Indikator Kinerja ini berjalan sesuai dengan rencana. Beberapa hal yang menjadi hambatan adalah terkait dengan koordinasi dengan pihak lain, mengingat beberapa kegiatan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan ini melibatkan institusi atau lembaga lainnya.

d. Rencana Aksi

Rencana aksi atas capaian dari indikator ini adalah melakukan pemantauan atas beberapa rekomendasi kebijakan yang telah disusun sehingga menjadi sebuah ketetapan. Hal ini perlu dilakukan karena beberapa rekomendasi kebijakan melibatkan lembaga lain untuk penetapannya, diantaranya Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk penetapan RSNi bidang perbenihan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk harmonisasi Peraturan Menteri tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional.

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatkan Akses Permodalan dan Jaminan Usaha

IKU 1: Persentase Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang Diterbitkan

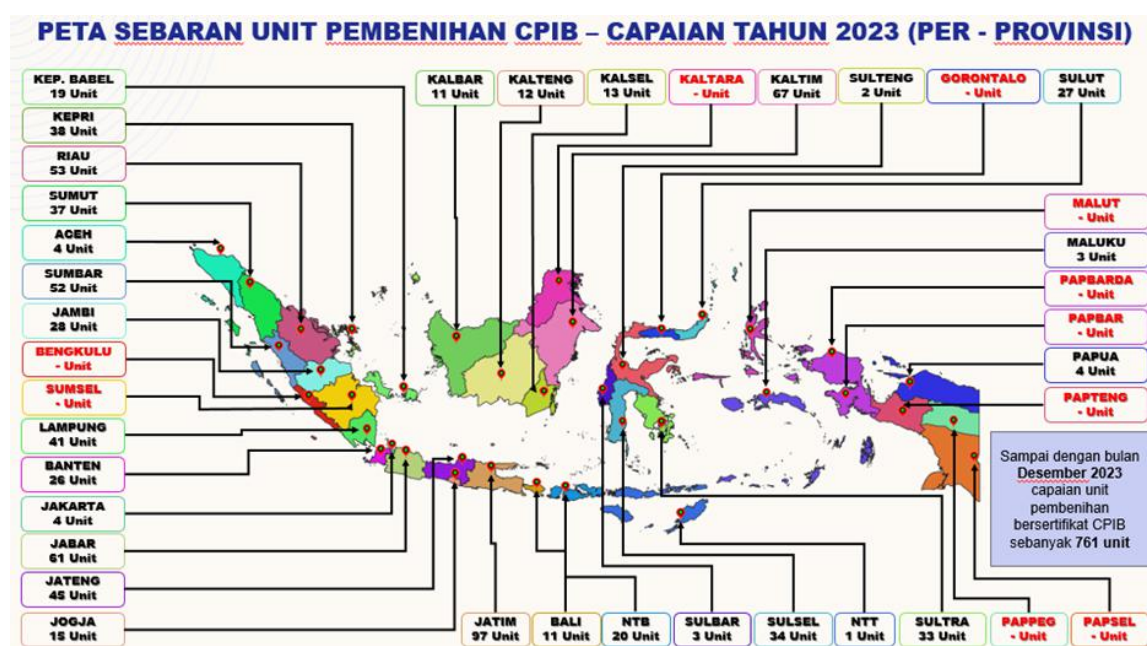
Sertifikasi CPIB merupakan kegiatan penilaian cara pembenihan ikan yang baik yang meliputi cara mengembangbiakan ikan dengan melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva/ benih dalam lingkungan yang terkontrol melalui penerapan teknologi yang memenuhi persyaratan biosekuriti, mampu telusur, keamanan pangan dan lingkungan. Persentase capaian diukur dengan menghitung jumlah sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan dibagi dengan jumlah unit pembenihan yang dinilai.

Tabel 18. Persentase Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang Diterbitkan

Sasaran Strategis : Meningkatnya Akses Permo3alan dan Jaminan Usaha									
Indikator Kinerja : Persentase Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang Diterbitkan									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	80 %	95,07 %	118,83%	-	-

a. Analisa

Pada tahun 2023, DJPB menargetkan sebanyak 750 unit pembenihan dapat tersertifikasi CPIB, dengan target pada IKU adalah 80% unit pembenihan lulus penilaian dibandingkan dengan unit yang dinilai. Sampai dengan akhir tahun 2023 telah dilakukan penilaian terhadap 799 unit pembenihan, dimana setelah dilakukan pengujian dalam rapat teknis dengan hasil 761 unit dinyatakan lulus dan 38 unit tidak lulus. Sehingga persentase unit pembenihan yang dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi CPIB dibandingkan dengan unit yang dilakukan penilaian adalah sebesar 95,24%. Jika dibandingkan dengan jumlah unit pembenihan yang ditargetkan untuk disertifikasi CPIB, maka persentase capaian hingga akhir tahun 2023 adalah sebesar 101,47% dari target sebanyak 750 unit.



Gambar 15. Peta sebaran unit pembenihan yang tersertifikasi CPIB tahun 2023

b. Anggaran dan Realisasi

Pagu anggaran untuk kegiatan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 1.875.000.000,-. Sampai akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 1.874.805.000,- atau 99,99%.

c. Permasalahan

Pelaksanaan sertifikasi CPIB saat ini diwajibkan melalui OSS. Hal ini menjadi kendala bagi para pembenih skala mikro-kecil yang kurang memahami tata cara pendaftaran melalui mekanisme online. Selain itu masih terdapat unit pembenihan yang telah habis masa berlaku sertifikat CPIB namun tidak mengajukan perpanjangan ulang.

d. Rencana Aksi

Pada periode berikut, perlu digiatkan lagi kegiatan sosialisasi dan pembinaan bagi unit pembenihan baik itu skala mikro-kecil dan menengah-besar. Termasuk peningkatan kompetensi terhadap manajer pengendali mutu melalui bimbingan teknis. Kegiatan survaian atas penerapan prinsip-prinsip CPIB harus dilaksanakan pada unit-unit pembenihan yang telah bersertifikasi CPIB supaya menjaga kualitas produk yang dihasilkan yaitu benih.

SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan

IKU 1 : Nilai PM SAKIP Direktorat Perbenihan

Nilai PM SAKIP Direktorat Perbenihan merupakan indikator kinerja yang targetnya bersifat tahunan dan pencapaiannya dihitung di akhir tahun berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal KKP terhadap pemenuhan dokumen dan capaian kinerja Direktorat Perbenihan.

Tabel 19. Nilai PM SAKIP Direktorat Perbenihan

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan									
Indikator Kinerja : Nilai PM Sakip Direktorat Perbenihan									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	75 %	64,05 %	85,4%	-	-

Realisasi PM Sakip seperti tertera di Tabel diatas, capaian pada tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 64,05% atau sekitar 85,4% dari target yang telah ditetapkan. Indikator ini belum bisa dijadikan pembandingan atas keberhasilan pada tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru.

SASARAN STRATEGIS 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan

IKU 1 : Persentase Pelaku Usaha yang Terlibat di Kegiatan Perbenihan Terintegrasi KUSUKA

Indikator Kinerja ini merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit, valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/ *updating* data pelaku usaha yang terlibat di kegiatan perbenihan. Target total pelaku usaha yang terdaftar di KUSUKA sebanyak 960 orang.

Tabel 20. Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan									
Indikator Kinerja : Persentase Pelaku Usaha yang Terlibat di Kegiatan Perbenihan Terintegrasi KUSUKA									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	80 %	694,89 %	868.61%	-	-

Capaian indikator kegiatan persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA pada tahun 2023 seperti tertera dalam tabel diatas dengan realisasi mencapai 6.671 orang atau sekitar 694,89% dari persentase target sebesar 80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA di bidang pembenihan dan pendederan cukup besar dan sudah dikategorikan cukup baik karena telah melebihi dari target, namun dalam pelaksanaan selanjutnya masih dapat dioptimalkan Kembali.

Rencana tindak lanjut pada tahun berikutnya agar pelaku usaha yang terlibat di kegiatan perbenihan didorong untuk mendaftar di aplikasi KUSUKA sehingga tercantum di database.

IKU 2 : Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan

Indikator kinerja ini adalah adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar profesional ASN terdiri dari :

- a. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS. Bobot dimensi ini sebesar 25%, dengan besaran sub-bobot : (i) S-3 sebesar 25%; (ii) S-2 sebesar 20%; (iii) S-1/D-IV sebesar 15%; (iv) D-III sebesar 10%; (v) SLTA/D-I/D- II/ sederajat sebesar 5%; dan dibawah SLTA sebesar 1%.
- b. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis).

Tabel 21. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan									
Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
72,33	64,10	74,56	78,78	81,88	81	84,91	104,83%	85	99,89

Realisasi indikator indeks profesionalitas ASN pada tahun 2023 mencapai 84,91 atau tercapai sekitar 104,83% dari target yang ditetapkan sebesar 81. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 terjadi kenaikan nilai sekitar 3,03 dan mengalami kenaikan sekitar 3,56% dari target renstra DJPB pada tahun 2024 dengan target 85. Nilai capaian IP ASN dari setiap komponen yang dinilai dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 22. Nilai capaian IP ASN dari setiap komponen yang dinilai

No.	Unit Kerja	Jumlah pegawai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total	Keterangan
1	<u>SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA</u>	103	20.98	39.17	25	5	90.16	TINGGI
2	<u>DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN</u>	39	21.74	31.33	25	5	83.07	TINGGI
3	<u>DIREKTORAT PERBENIHAN</u>	38	21.61	33.31	25	5	84.91	TINGGI
4	<u>DIREKTORAT PAKAN DAN OBAT IKAN</u>	39	21.28	34.72	25	5	86.01	TINGGI
5	<u>DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA</u>	36	22.06	31.43	25	5	83.49	TINGGI

Capaian Indeks Profesionalitas ASN unit kerja Lingkup Direktorat Perbenihan pada tahun 2023 sebesar 84,91 atau 104,83% terhadap target tahunan. Capaian pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan renstra DJPB tahun 2020-2024 sebesar 99,89% dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 85.

Untuk meningkatkan capaian di semester selanjutnya, maka diharapkan seluruh pegawai meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan atau seminar/webinar.

Rencana aksi atas hasil capaian tahun 2023, Direktorat Perbenihan menghimbau kepada seluruh PNS agar meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti seminar, pelatihan secara online maupun offline. Dan Rencana aksi tahun 2023 adalah mengusulkan pegawai Direktorat Perbenihan serta CPNS yang ditempatkan di Direktorat Perbenihan untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan secara online maupun offline.

IKU 3 : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan

Indikator Kinerja pada sasaran strategis ini adalah persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IK dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Tabel 23. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan

\Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan									
Indikator Kinerja : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	92,47	100	100	100	92	125,9	136,85%	-	-

Pada tahun 2023 target manajemen pengetahuan yang terstandar Direktorat Perbenihan ditargetkan 92 dengan realisasi 133,33%. Apabila dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya terdapat perbedaan capaian, hal ini karena manajemen pengetahuan terstandar hanya diwajibkan bagi Eselon 2.

Rencana aksi di tahun 2024, agar setiap eselon 2 selalu mempersiapkan laporan yang dianggap perlu untuk dipublikasikan secara benar dengan memperhatikan kaidah transparan, efisien, dan selalu tepat waktu dan tepat sasaran.

IKU 4 : Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Direktorat Perbenihan

Indikator kinerja ini bersifat tahunan dan dihitung berdasarkan penyelesaian LHP BPK satker Direktorat Perbenihan sesuai laporan hasil audit BPK RI. Indikator kinerja ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 24. Persentase penyelesaian LHP BPK atas Satker Direktorat Perbenihan tahun 2023

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan									
Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Direktorat Perbenihan									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	-	-

Pengukuran Indikator kinerja tahun 2023 ini dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal KKP terhadap realisasi capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2023.

Direktorat Perbenihan sampai akhir tahun 2023 telah tuntas menyelesaikan atas temuan LHP BPK, kondisi ini dapat dipastikan dengan telah selesainya hasil persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode akhir Tahun 2023 sebesar 100 % (tuntas).

Rencana aksi atas rekomendasi hasil capaian pada tahun 2023, Direktorat Perbenihan agar bisa mempertahankan atas hasil yang diperoleh dan memperbaiki sistem pelaporan untuk mendukung pemenuhan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

IKU 5 : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perbenihan yang dokumen tindak lanjutnya dari Direktorat Perbenihan telah tuntas berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Perbenihan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat) yang

terbit pada tahun yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Perbenihan yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 25. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perbenihan

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan									
Indikator Kinerja : Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perbenihan									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	100%	100 %	75 %	100 %	133,33%	85	117,64

Pada tahun 2023 capaian hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap pelaksanaan kegiatan Direktorat Perbenihan tidak terdapat temuan, sehingga untuk IKU ini, Direktorat Perbenihan secara administratif telah tuntas diselesaikan. Apabila dibandingkan dengan periode tahun 2022, pencapaian target Direktorat Perbenihan menunjukkan hasil yang sama yaitu telah ditindaklanjuti sehingga pencapaian nilainya 100%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra DJPB tahun 2020-2024, yaitu target tahun 2024 adalah 85, capaian direktorat Perbenihan telah mencapai 117,64%.

Adapun rencana aksi tahun 2024, Direktorat Perbenihan mengupayakan tetap mempertahankan nilai capaian dengan memastikan semua pengadministrasian kegiatan agar bisa dilengkapi dan tepat waktu serta akuntabel.

IKU 6 : Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan

Persentase pelaksanaan layanan perantoran adalah Indikator Kinerja Kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena indikator kinerja ini merupakan ukuran atas pelaksanaan layanan perkantoran yang meliputi pelayanan jasa, administrasi dan keuangan yang terjadi di Satker Direktorat Perbenihan.

Tabel 26. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan									
Indikator Kinerja : Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	100 %	75 %	100 %	133,33%	-	-

Capaian indikator kegiatan pelaksanaan layanan perkantoran tahun 2023 mencapai 100% atau sekitar 133,33% dari target 75% yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator ini merupakan hasil kerja Direktorat Perbenihan terutama terkait pelayanan perkantoran seperti pelayanan internal berupa pemberian nomor surat berdasarkan data yang masuk untuk permintaan nomor sebanyak 360 surat dengan semua surat terlayani dan layanan rapat yang dilakukan secara offline dari total permintaan 10 kali semuanya telah tuntas dilakukan.

Rencana aksi atas capaian periode berikutnya adalah untuk meningkatkan pelayanan lebih baik agar tetap dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

IKU 7 : Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Pada Tahun 2023, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan di satker Direktorat Perbenihan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;

2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan;
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Tabel 27. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Direktorat Perbenihan

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan									
Indikator Kinerja : Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Perbenihan									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	75,48	94,04	89,71	77,5	93,46	120,59%	-	-

Capaian tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Perbenihan pada tahun 2023 mencapai 93,46 atau 120,59% dari target sebesar 77,5. Apabila dibandingkan pada periode yang sama dengan tahun sebelumnya, maka capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sekitar 3,75 dari nilai 89,71 pada tahun 2022 menjadi 93,46 pada tahun 2023.

Rencana aksi di tahun 2024, untuk dapat meningkatkan tingkat efektivitas maka upaya yang harus diperhatikan dalam penyaluran bantuan harus memperhatikan pencapaian tujuan, integrasi dan adaptif.

IKU 8 : Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan

Persentase realisasi keuangan Direktorat Perbenihan adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas realisasi penyerapan anggaran berdasarkan terhadap pagu anggaran Direktorat Perbenihan.

Tabel 28. Capaian Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan Tahun 2023.

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan									
Indikator Kinerja : persentase Realisasi Keuangan Direktorat PerbenihN									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	98 %	99,98 %	102,02%	-	-

Capaian indikator kegiatan persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan tahun 2023, seperti terlihat dalam tabel diatas, dimana realisasi mencapai 99,98% atau 102,02 % dari target yang telah ditetapkan.

Rencana aksi tahun 2024 adalah realisasi keuangan dapat dijertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat lebih meningkat.

BAB 4. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Perbenihan tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala terhadap capaian strategis Direktorat Perbenihan. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja semuanya masuk kategori berhasil dicapai, kecuali ada satu indikator yaitu nilai PM SAKIP yang masih di bawah target.

Masih banyak tantangan di bidang perbenihan ikan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, mulai dari penyediaan induk unggul dan benih bermutu di masyarakat serta sistem logistik peredarannya, serta peningkatan mutu benih melalui jaminan sertifikasi CPIB pada unit-unit pembenihan.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Direktorat Perbenihan dalam mendukung pembangunan perikanan budidaya melalui kegiatan di bidang pengelolaan perbenihan ikan tahun 2023 tidak terlepas dari dukungan seluruh komponen yang terkait, mulai dari internal lingkup Direktorat Perbenihan dan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya termasuk Unit Pelaksana Teknis, sinergi dan kolaborasi dengan eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota serta unit-unit pembenihan mulai dari skala mikro-kecil sampai menengah-besar.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja tahun 2023, Direktorat Perbenihan tahun 2023 sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Perlu mempertahankan target – target indikator kinerja Utama (IKU) yang sudah tercapai dengan melakukan monitoring dan pendokumentasian yang baik sehingga konsistensi pencapaian target kinerja dapat dipertahankan.
2. Melakukan percepatan pembinaan terhadap unit pembenihan, sehingga akan mempermudah terhadap proses sertifikasi selanjutnya.

3. Memastikan ketersediaan induk unggul dan benih bermutu di masyarakat melalui penciptaan induk-induk unggul baru hasil pemuliaan dan dilakukan pelepasan (*release*) secara resmi, perbaikan sistem logistik induk dan benih melalui pembentukan *broodstock center* dan *multiplication broodstock center*, dan peningkatan teknologi bidang perbenihan.

DATA DUKUNG

A. Tenaga kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan

Tabel a. Tenaga kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan

No	Kegiatan	Target		Realisasi	
		Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	Bantuan Benih	7824	orang	15510	orang
2	Bantuan Calin	2880	orang	2940	orang
3	Bantuan KBRL	1280	orang	1980	orang
4	Bantuan KJA	1625	orang	1320	orang
5	Bantuan UPR	484	orang	520	orang
6	Bantuan Jaring	400	orang	450	orang
	TOTAL	14.493		22.720	

Perhitungan tenaga kerja yang terlibat di bidang perbenihan, yaitu:

$$\text{Jumlah tenaga kerja} = A + B + C + D + E + F$$

Keterangan:

A = Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada bantuan benih

B = Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada bantuan calon induk

C = Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada bantuan Kebun Bibit Rumput Laut

D = Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada bantuan Keramba Jaring Apung HDPE

E = Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada bantuan sapsras UPR

F = Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada bantuan jaring

Berdasarkan tabel di atas, jumlah tenaga kerja yang terlibat dibidang perbenihan sebanyak 22.720 orang.

B. Persentase Bantuan Prasarana Budi Daya Laut yang Disalurkan

REALISASI BANTUAN KJA DAN JARING TAHUN 2023

No	Jenis Bantuan	Entitas	Nama Ketua	Nama Kelompok	Desa	Kacamatan	Kota/Kabupaten	Provinsi	SK Penerima	Jumlah Bantuan yang Disalurkan	Jumlah Bantuan	RD	Terdistribusi
1	KJA HDPE	Pusat	Yoga Wally	Maga	Plu	Senam Barat	Senam Bagian Barat	Maluku	352/DP/SK/2023	2	2	MLN	Terdistribusi
2	KJA HDPE	Pusat	Lu Umanan	Tiger	Plu	Senam Barat	Senam Bagian Barat	Maluku	352/DP/SK/2023	2	2	MLN	Terdistribusi
3	KJA HDPE	Pusat	Sugali Suryadi	Mentari Laut	Et	Senam Barat	Senam Bagian Barat	Maluku	352/DP/SK/2023	2	2	MLN	Terdistribusi
4	KJA HDPE	Pusat	Nail Indra	Ant Jaya	Lata	Teluk Ambon Baguala	Ambon	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
5	KJA HDPE	Pusat	Rizal Rusli	Bersukula	Lata	Teluk Ambon Baguala	Ambon	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
6	KJA HDPE	Pusat	La Budi	Hidayah	Lata	Teluk Ambon Baguala	Ambon	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
7	KJA HDPE	Pusat	Pannen Tagau	Cahaya Meja	Lata	Teluk Ambon Baguala	Ambon	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
8	KJA HDPE	Pusat	Masach Willem Suroso	Mansa	Halong	Teluk Ambon Baguala	Ambon	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
9	KJA HDPE	Pusat	Maron Surokoto	Blue Iti	Nagari Lama	Teluk Ambon Baguala	Ambon	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
10	KJA HDPE	Pusat	Lu Anlu	Lesta Dua Wafata	Wiyehu	Baguala	Ambon	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
11	KJA HDPE	Pusat	An Yanto	Kabau	Wabehu	Baguala	Ambon	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
12	KJA HDPE	Pusat	Ench F	Depapan	Poka	Teluk Ambon	Ambon	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
13	KJA HDPE	Pusat	Tanya Terjua	Elkian	Humul	Teluk Ambon	Ambon	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
14	KJA HDPE	Pusat	Said Marubata Aljabar	Sesari	Senam Utara	Maluku Tengah	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi	
15	KJA HDPE	Pusat	Syafi Tumbak	Katayapa	Sesari	Senam Utara	Maluku Tengah	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
16	KJA HDPE	Pusat	Umar Lelahti	Tolon An	Sesari	Senam Utara	Maluku Tengah	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
17	KJA HDPE	Pusat	Lukman Wero	Gerapa	Negeri Administrasi Bani	Senam Utara	Maluku Tengah	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
18	KJA HDPE	Pusat	Jafar Walisa	Balibo 02	Negeri Administrasi Bani	Senam Utara	Maluku Tengah	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
19	KJA HDPE	Pusat	Ahmad Sulaiman Lelahti	Semander	Negeri Administrasi Bani	Senam Utara	Maluku Tengah	Maluku	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
20	KJA HDPE	Pusat	Safarudin Masulakong	Singa Laut	Bajo	Bolong Lomang	Halmahera Selatan	Maluku Utara	352/DP/SK/2023	2	2	MLN	Terdistribusi
21	KJA HDPE	Pusat	Muhidin Nababan	Duangang Rappakapan	Bajo	Bolong Lomang	Halmahera Selatan	Maluku Utara	352/DP/SK/2023	2	2	MLN	Terdistribusi
22	KJA HDPE	Pusat	Jah Anis	Yaro	Tobelo Timur	Halmahera Utara	Maluku Utara	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi	
23	KJA HDPE	Pusat	Maman Dia Myria	Sinar Bahari	Kupa Kupa	Tobelo Timur	Halmahera Utara	Maluku Utara	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
24	KJA HDPE	Pusat	Muhammad Nurulhuda	Lautan Jaya	Lewote	Tobelo Selatan	Halmahera Utara	Maluku Utara	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
25	KJA HDPE	Pusat	Hermeto Sika	Pahi Lasa	Kali Uka	Tobelo Tengah	Halmahera Utara	Maluku Utara	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
26	KJA HDPE	Pusat	Wahid Indani	Bahar Lauter	Lewo	Tobelo Utara	Halmahera Utara	Maluku Utara	352/DP/SK/2023	2	1	MLN	Terdistribusi
27	KJA HDPE	Pusat	Mamad Fauz	Sekodua	Kokoku	Mooka Selatan	Pulau Morote	Maluku Utara	352/DP/SK/2023	2	2	MLN	Terdistribusi
28	KJA HDPE	Pusat	Ahmad Bala	Getepala	Kokoku	Mooka Selatan	Pulau Morote	Maluku Utara	352/DP/SK/2023	2	2	MLN	Terdistribusi
29	KJA HDPE	Pusat	Suwarno	Selang Jaya	Jeringan	Pangajaran	Kayupuan	Jawa Timur	852/DP/SK/2023	2	2	KPS PAKET 1	Terdistribusi
30	KJA HDPE	Pusat	Mah Muksil	Gida Bahari	Larangan	Pangajaran	Kayupuan	Jawa Timur	852/DP/SK/2023	2	2	KPS PAKET 1	Terdistribusi
31	KJA HDPE	Pusat	Sholih	Pulau Gili Kelabang	Gili Kelabang	Sumberasih	Probolinggo	Jawa Timur	852/DP/SK/2023	2	2	KPS PAKET 1	Terdistribusi
32	KJA HDPE	Pusat	Ah. Murti Nugroho	Pemantauan Jaya	Gili Kelabang	Sumberasih	Probolinggo	Jawa Timur	852/DP/SK/2023	2	1	KPS PAKET 1	Terdistribusi
33	KJA HDPE	Pusat	Jumadi	Sesau Jagat Gili	Gili Kelabang	Sumberasih	Probolinggo	Jawa Timur	852/DP/SK/2023	2	1	KPS PAKET 1	Terdistribusi
34	KJA HDPE	Pusat	Indra Kurniawan	Pacaki Selat	Selang Pasing	Kampung Barat	Kepulauan Meranti	Riau	852/DP/SK/2023	2	2	KPS PAKET 1	Terdistribusi
35	KJA HDPE	Pusat	Azzahri	Jala Annada	Selang Pasing	Kampung Barat	Kepulauan Meranti	Riau	852/DP/SK/2023	2	1	KPS PAKET 1	Terdistribusi
36	KJA HDPE	Pusat	Zulkarnain	Korap	Selang Pasing	Kampung Barat	Kepulauan Meranti	Riau	852/DP/SK/2023	2	1	KPS PAKET 1	Terdistribusi
37	KJA HDPE	Pusat	Nashir	Bahar Serantau	Tembeling Tanjung	Terak Bersama	Bentan	Kepulauan Riau	852/DP/SK/2023	2	2	KPS PAKET 1	Terdistribusi
38	KJA HDPE	Pusat	Suninar	Teluk Bersama	Tembeling Tanjung	Terak Bersama	Bentan	Kepulauan Riau	852/DP/SK/2023	2	2	KPS PAKET 1	Terdistribusi
39	KJA HDPE	Pusat	Sedana	Pumpuara	Gilang Baru	Gilang	Bentan	Kepulauan Riau	852/DP/SK/2023	2	1	KPS PAKET 1	Terdistribusi
40	KJA HDPE	Pusat	Serin	Kawahang Tanjung	Gilang Baru	Gilang	Bentan	Kepulauan Riau	852/DP/SK/2023	2	1	KPS PAKET 1	Terdistribusi
41	KJA HDPE	Pusat	Malikho	Sisa-Sisa	Sula Karya	Semaula Timur	Semaula	Aceh	852/DP/SK/2023	2	1	KPS PAKET 1	Terdistribusi
42	KJA HDPE	Pusat	Eddy Soliman	Sambula	Sula Karya	Semaula Timur	Semaula	Aceh	852/DP/SK/2023	2	1	KPS PAKET 1	Terdistribusi
43	KJA HDPE	Pusat	Maksum	Gula Kemantaha	Sula Mado	Semaula Timur	Semaula	Aceh	852/DP/SK/2023	2	1	KPS PAKET 1	Terdistribusi
44	KJA HDPE	Pusat	Bani Madam	Arak Ulu	An-Dipin	Semaula Timur	Semaula	Aceh	852/DP/SK/2023	2	1	KPS PAKET 1	Terdistribusi
45	KJA HDPE	Pusat	Achir	Borok	Kala	Kora Timur	Nusa Tenggara Barat	852/DP/SK/2023	2	2	KPS PAKET 1	Terdistribusi	
46	KJA HDPE	Pusat	Achir	Borok	Kala	Kora Timur	Nusa Tenggara Barat	852/DP/SK/2023	2	2	KPS PAKET 1	Terdistribusi	
47	KJA HDPE	Pusat	Samp Jalis	Bina Uluha I	Sidohi	Teluk Pandan	Pondorek	Lampung	852/DP/SK/2023	2	1	KPS PAKET 1	Terdistribusi
48	KJA HDPE	Pusat	Schabti	Mina Bekah Haraan	Sidohi	Teluk Pandan	Pondorek	Lampung	852/DP/SK/2023	2	1	KPS PAKET 1	Terdistribusi
49	KJA HDPE	Pusat	Abu Bakar	Borawang	Pulus Pangang	Kepulauan Seribu Utara	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	852/DP/SK/2023	2	2	KPS PAKET 1	Terdistribusi
50	KJA HDPE	Pusat	Abdul Majid	Karapa Lodi	Pulus Pangang	Kepulauan Seribu Utara	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	852/DP/SK/2023	2	2	KPS PAKET 1	Terdistribusi

C. Persentase Bantuan Sarana Unit Perbenihan yang Disalurkan

Tabel c. Persentase Bantuan Sarana Unit Perbenihan yang Disalurkan

NO	Lokasi			Jenis Bantuan	Penerima	BAST	
	Desa/ Kel.	Kec.	Kab./ Kota			KUB	Nomor
1	Ds. Biru-Biru	Biru-Biru	Deli Serdang	Sarana UPR	Pokdakan Kata Ersada	5856/DJPB.1/BAST/VII/2023	13 Juli 2023
2	Ds. Mbaruai	Biru-Biru	Deli Serdang	Sarana UPR	Pokdakan Jadi Mekar	5857/DJPB.1/BAST/VII/2023	13 Juli 2023
3	Kel. Suka Maju	Binjai Barat	Kota Binjai	Sarana UPR	Pokdakan Maju Sejahtera I	5858/DJPB.1/BAST/VII/2023	13 Juli 2023
4	Kel. Suka Maju	Binjai Barat	Kota Binjai	Sarana UPR	Pokdakan Anugerah Lele	5859/DJPB.1/BAST/VII/2023	13 Juli 2023
5	Ds. Beringin Taluk	Kuantan Tengah	Kuantan Singingi	Sarana UPR	Kelompok Sungai Siriah	6296/DJPB.1/BAST/VII/2023	31 Juli 2023
6	Ds. Beringin Taluk	Kuantan Tengah	Kuantan Singingi	Sarana UPR	Kelompok Bintang Laksanama Muda	6297/DJPB.1/BAST/VII/2023	31 Juli 2023
7	Jorong Cicawan Nagari Paninjauan	Tanjung Raya	Agam	Sarana UPR	Kelompok Harapan Baru	6298/DJPB.1/BAST/VII/2023	31 Juli 2023
8	Jorong Cicawan Nagari Paninjauan	Tanjung Raya	Agam	Sarana UPR	Pokdakan Sikabu Jaya	6299/DJPB.1/BAST/VII/2023	31 Juli 2023
9	Ds. Kajai	Pariaman Timur	Kota Pariaman	Sarana UPR	Pokdakan Revi Martha Fish Farm	6300/DJPB.1/BAST/VII/2023	31 Juli 2023
10	Ds. Cimparuh	Pariaman Tengah	Kota Pariaman	Sarana UPR	Pokdakan Jaya Catfish	6301/DJPB.1/BAST/VII/2023	31 Juli 2023
11	Ds. Penanjung Panjang	Tebat Karai	Kepahiang	Sarana UPR	Pokdakan Penanjung Panjang Mandiri	6942/DJPB.1/BAST/VIII/2023	24 Agustus 2023
12	Ds. Leumpang	Ratu Agung	Kota Bengkulu	Sarana UPR	Forum Pembenh Ikan	6943/DJPB.1/BAST/VIII/2023	24 Agustus 2023
13	Dsn. II Permu Bawah	Kepahiang	Kepahiang	Sarana UPR	Pokdakan Makmur	6944/DJPB.1/BAST/VIII/2023	24 Agustus 2023
14	Ds. Talang Lindung	Sungai Bungkal	Kota Sungai Penuh	Sarana UPR	Pokdakan Ceria	6945/DJPB.1/BAST/VIII/2023	24 Agustus 2023
15	Ds. Paling Serumpun	Hamparan Rawang	Kota Sungai Penuh	Sarana UPR	Pokdakan Mutiara Serumpun	6946/DJPB.1/BAST/VIII/2023	24 Agustus 2023
16	Kel. Cambai	Cambai	Kota Prabumulih	Sarana UPR	Kelompok Usaha Mina	5860/DJPB.1/BAST/VII/2023	13 Juli 2023
17	Kel. Sukaraja	Prabumulih Selatan	Kota Prabumulih	Sarana UPR	Kelompok Air Manau	5861/DJPB.1/BAST/VII/2023	13 Juli 2023
18	Ds. Sungai Rengit	Talang Kelapa	Banyuasin	Sarana UPR	Pokdakan Waw Fish Farm	5862/DJPB.1/BAST/VII/2023	13 Juli 2023
19	Ds. Sukamoro	Talang Kelapa	Banyuasin	Sarana UPR	Pokdakan Tanjung Sari Mandiri	5863/DJPB.1/BAST/VII/2023	13 Juli 2023
20	Ds. Sungai Badak	Mesuji	Mesuji	Sarana UPR	Pokdakan Maju Bersama Mesuji	5695/DJPB.1/BAST/VII/2023	7 Juli 2023
21	Ds. Sungai Badak	Mesuji	Mesuji	Sarana UPR	Pokdakan Sepat Mate Abang	5696/DJPB.1/BAST/VII/2023	7 Juli 2023
22	Pekon Pagelaran	Pagelaran	Pringsewu	Sarana UPR	Pokdakan Sinar Mas Pagelaran	5697/DJPB.1/BAST/VII/2023	7 Juli 2023
23	Pekon Pujiharjo	Pagelaran	Pringsewu	Sarana UPR	Pokdakan Karya Lestari Sejahtera	5698/DJPB.1/BAST/VII/2023	7 Juli 2023
24	Pekon Putra	Sumber Jaya	Lampung Barat	Sarana UPR	Pokdakan Berkah Bersama	5699/DJPB.1/BAST/VII/2023	7 Juli 2023
25	Pekon Kagungan	Lumbok Semunging	Lampung Barat	Sarana UPR	Kelompok UPR Uyas Nila	5700/DJPB.1/BAST/VII/2023	7 Juli 2023
26	Ds. Bangunharja	Cisaga	Ciamis	Sarana UPR	Pokdakan Mina Ranca Goong	5764/DJPB.1/BAST/VII/2023	11 Juli 2023
27	Ds. Kepayang	Anjongan	Mempawah	Sarana UPR	Kelompok UPR Rezeki Bersama	5765/DJPB.1/BAST/VII/2023	11 Juli 2023
28	Ds. Pak Bulu	Anjongan	Mempawah	Sarana UPR	Kelompok UPR	5766/DJPB.1/BAST/	11 Juli 2023

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERBENIHAN TAHUN 2023

NO	Lokasi			Jenis Bantuan	Penerima	BAST	
	Desa/ Kel.	Kec.	Kab./ Kota			Nomor	Tanggal
					Gemura	VII/2023	
29	Ds. Jamali	Mande	Cianjur	Sarana UPR	Kelompok Baraya Lele	5767/DJPB.1/BAST/VII/2023	11 Juli 2023
30	Ds. Tanjungsari	Sukaluyu	Cianjur	Sarana UPR	Kelompok Tonjong Berkah	5768/DJPB.1/BAST/VII/2023	11 Juli 2023
31	Ds. Petarangan	Kemrajen	Banyumas	Sarana UPR	Kelompok Tri Tunggal	5864/DJPB.1/BAST/VII/2023	13 Juli 2023
32	Ds. Petarangan	Kemrajen	Banyumas	Sarana UPR	Kelompok Manunggal	5865/DJPB.1/BAST/VII/2023	13 Juli 2023
33	Ds. Gumiwang	Purwanegara	Banjarnegara	Sarana UPR	Kelompok Mina Karya	5866/DJPB.1/BAST/VII/2023	13 Juli 2023
34	Ds. Gumiwang	Purwanegara	Banjarnegara	Sarana UPR	Kelompok Mina Dakita	5867/DJPB.1/BAST/VII/2023	13 Juli 2023
35	Ds. Ngrajek	Mungkid	Magelang	Sarana UPR	Kelompok Mina Abadi Sejahtera Danggan	5868/DJPB.1/BAST/VII/2023	13 Juli 2023
36	Kel. Muntilan	Muntilan	Magelang	Sarana UPR	Kelompok Mina Sari	5869/DJPB.1/BAST/VII/2023	13 Juli 2023
37	Pelem	Pare	Kediri	Sarana UPR	Kelompok Beong Lele Mulyo	6047/DJPB.1/BAST/VII/2023	21 Juli 2023
38	Ds. Tertek	Pare	Kediri	Sarana UPR	Kelompok Dewa Lele	6048/DJPB.1/BAST/VII/2023	21 Juli 2023
39	Ds. Kuwiran	Banyudono	Boyolali	Sarana UPR	Kelompok UPR Langgeng Mina Barokah	6049/DJPB.1/BAST/VII/2023	21 Juli 2023
40	Ds. Manggis	Mojosongo	Boyolali	Sarana UPR	Pokdakan UPR Sari Mina	6050/DJPB.1/BAST/VII/2023	21 Juli 2023
41	Ds. Teratak	Batukliang Utara	Lombok Tengah	Sarana UPR	UPR Karya Mandiri Sejahtera	6051/DJPB.1/BAST/VII/2023	21 Juli 2023
42	Ds. Bunkate	Jonggat	Lombok Tengah	Sarana UPR	Pokdakan Insan Maju	6052/DJPB.1/BAST/VII/2023	21 Juli 2023

Perhitungan Persentase bantuan benih yang tersalurkan usulan masyarakat, yaitu:

Persentase capaian

$$= \frac{\text{Jumlah kelompok yang menerima bantuan sarana unit pembenihan}}{\text{Jumlah kelompok yang diverifikasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{42}{42} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan tabel di atas, bantuan sarana unit perbenihan yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat yang telah direalisasi sebanyak 42 kelompok (1 paket per kelompok) dari 42 kelompok yang diverifikasi, dengan hasil capaian tahun 2023 sebesar 100%.

D. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan

Tabel d. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan

No	Unit Pelaksana Teknis	KBRL yang disalurkan (unit)	Usulan KBRL yang terverifikasi (unit)
1	Direktorat Perbenihan	72	72
2	BBPBAP Jepara	5	5
3	BBPBL Lampung	20	20
4	BPBAP Situbondo	15	15
5	BPBL Lombok	15	15
6	BPBL Ambon	46	46
7	BPBAP Takalar	35	35
8	BPBL Batam	8	8
TOTAL		216	216

100%

Perhitungan persentase bantuan sarana kebun bibit rumput laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat, yaitu:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Jumlah unit KBRL yang disalurkan}}{\text{Jumlah unit KBRL yang diusulkan dari proposal yang terverifikasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{216}{216} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas, bantuan sarana KBRL yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat yang telah direalisasi sebanyak 216 unit dari 216 unit yang terverifikasi, dengan hasil capaian sebesar 100%.

E. Persentase Pusat Produksi Benih dan Induk yang Operasional

Pusat Produksi Benih dan Induk yang diukur berlokasi di Dharmasraya, Musirawas, dan Mesuji. Capaian persentase masing-masing lokasi pada tahun 2023 periode bulan Januari s.d. Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pusat Produksi Benih dan Induk Kab Mesuji

- Memiliki sarana produksi, namun belum melakukan pemeliharaan (Pembangunan tahun pertama dari rencana 5 tahun waktu pelaksanaan pembangunan).
- Persentase capaian sebesar 15%

2. Broodstock Center Kab Dharmasraya

- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, unit pendederan benih) dan sudah terdapat proses pemeliharaan induk/benih
- Memiliki sarana produksi minimal dan mampu produksi benih
- Memiliki sarana produksi dan sarana pendukung berupa gudang pakan/peralatan serta biosekuriti yang baik dan mampu produksi benih
- Memiliki sarana produksi, sarana pendukung, serta sarana biosekuriti lengkap dan mampu memproduksi benih/calon induk, serta telah menerapkan prinsip-prinsip CPIB
- Persentase capaian sebesar 75%

3. Broodstock Center Kab Musirawas

- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, unit pendederan benih) dan sudah terdapat proses pemeliharaan induk/benih
- Memiliki sarana produksi minimal dan mampu produksi benih
- Memiliki sarana produksi dan sarana pendukung berupa gudang pakan/peralatan serta biosekuriti yang baik dan mampu produksi benih
- Memiliki sarana produksi, sarana pendukung, serta sarana biosekuriti lengkap dan mampu memproduksi benih/calon induk, serta telah menerapkan prinsip-prinsip CPIB
- Persentase capaian sebesar 75%

Perhitungan Persentase, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata} &= \frac{\text{Persentase Mesuji} + \text{Persentase Dharmasraya} + \text{Persentase Musirawas}}{3} \\ &= \frac{15\% + 75\% + 75\%}{3} = \frac{165\%}{3} = 55\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel di atas, persentase capaian di Dharmasraya, Musirawas, dan Mesuji tahun 2023 adalah 55%, melebihi target tahun 2023 (40%).

F. Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan

Tabel f. Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan

No	UPT DJPB	Benih yang Terverifikasi (Ekor)	Benih yang Terdistribusi (Ekor)			Total Benih yang Terdistribusi (Ekor)	Persentase (%)
			Tawar	Payau	Laut		
1	BBPBAT SUKABUMI	7.166.612	9.543.000			9.543.000	133,16
2	BPBAT SEI GELAM	5.695.000	5.745.300			5.745.300	100,88
3	BPBAT MANDIANGIN	2.706.421	4.416.400			4.416.400	163,18
4	BPBAT TATELU	2.258.829	3.836.000			3.836.000	169,82
5	BBPBAP JEPARA	21.823.101		22.510.776		22.510.776	103,15
6	BPBAP UJUNG BATEE	8.275.400	800.000	7.681.510	347.200	8.828.710	106,69
7	BPBAP SITUBONDO	12.158.411		13.617.000	140.480	13.757.480	113,15
8	BPBAP TAKALAR	21.497.089	28.000	22.207.000	81.000	22.316.000	103,81
9	BBPBL LAMPUNG	641.122			719.500	719.500	112,23
10	BPBL AMBON	557.658			658.000	658.000	117,99
11	BPBL BATAM	571.177			571.900	571.900	100,13
12	BPBL LOMBOK	863.422	330.636		671.600	1.002.236	116,08
13	BPIUUK KARANGASEM	21.171.166		25.450.000	310.000	25.760.000	121,67
14	BLUPPB KARAWANG	2.478.373	2.472.535	855.000	40.500	3.368.035	135,90
	Jumlah	107.863.781	27.171.871	92.321.286	3.540.180	123.033.337	114,06

Perhitungan Persentase bantuan benih yang tersalurkan usulan masyarakat, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Persentase capaian} &= \frac{\text{Jumlah benih terdistribusi ke kelompok}}{\text{Jumlah usulan benih yang terverifikasi}} \times 100\% \\ &= \frac{123.033.337}{107.863.781} \times 100\% = 114,06\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel di atas, persentase bantuan benih yang tersalurkan usulan masyarakat tahun 2023 sebesar 114,06%.

G. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan

Tabel g. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan

No	UPT Pusat	Kontrak Kinerja	Realisasi Calon (Ekor)	Realisasi Perbulan												Presentase per UPT
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
	Jumlah	72.074	146.619	630	3.025	15.475	13.800	8.245	9.931	4.430	3.825	16.355	5.700	21.193	44.010	
1	BBPBAT Sukabumi	13.565	83.430	450	2.600	4.050	10.000	3.190	1.735	1.020	1.300	4.310	3.650	14.345	36.780	615%
2	BPBAT Sungai Gelam	12.000	13.385	180	315	5.385	1.450	590	1.000	400	1205	1.370	900	560	30	112%
3	BPBAT Tatelu	10.000	12.890	-	-	1.040	-	850	1.600	-	-	2.600	-	3.600	3.200	129%
4	BPBAT Mandiangin	11.000	11.708	-	110	600	200	-	2.050	300	-	6.450	1.150	848	-	106%
5	BBPBAP Jepara	4.180	210	-	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	5%
6	BPBAP Situbondo	2.429	2.500	-	-	-	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	103%
7	BPBAP Ujung Batee	1.550	4.015	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	4.000	259%
8	BPBAP Takalar	4.550	3.770	-	-	2.400	-	500	-	-	870	-	-	-	-	83%
9	BBPBL Lampung	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
10	BPBL Batam	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
11	BPBL Lombok	1.040	1.246	-	-	-	-	-	746	-	450	50	-	-	-	120%
12	BPBL Ambon	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
13	BPIUUK Karangasem	6.000	7.800	-	-	2.000	-	3.000	2.800	-	-	-	-	-	-	130%
14	BLUPPB Karawang	5.630	5.665	-	-	-	2.150	100	-	-	-	1.575	-	1.840	-	101%

Untuk UPT yang belum ada realisasi dikarenakan belum adanya usulan bantuan calon induk kepada UPT tersebut. Perhitungan presentase bantuan calon induk yang tersalurkan usulan masyarakat yaitu :

presentase capaian

$$= \frac{\text{Jumlah calon induk yang terdistribusi kekelompok}}{\text{Jumlah usulan calon induk yang terverifikasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{146.619}{72.704} \times 100\% = 203,43\%$$

H. Produksi Calon Induk yang Disalurkan

Tabel h. Produksi Calon Induk yang Disalurkan

MATRA	TARGET 2023	REALISASI												JUMLAH	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ekor	%
Tawar	505.055	18.255	24.412	17.509	31.606	63.667	50.306	43.787	50.467	32.543	41.164	44.866	71.272	489.854	96,99
Payau	450.482	6.500	12.400	16.500	11.000	12.660	100.300	116.301	16.380	65.826	9.120	98.000	71.090	536.077	119,00
Laut	10.434	510	592	1.064	139	1.642	1.458	1.073	473	769	125	1.879	4.090	13.814	132,39
	965.971	25.265	37.404	35.073	42.745	77.969	152.064	161.161	67.320	99.138	50.409	144.745	146.452	1.039.745	107,64

Berdasarkan tabel di atas, produksi calon induk tahun 2023 sebanyak 1.039.745 ekor, capaian di atas target yang telah ditetapkan (965.971 ekor).

I. Produksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala *Intermediate* di UPT (Planlet)

Tabel i. Produksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala *Intermediate* di UPT (Planlet)

No	Unit Pelaksanan Teknis	Jenis Bibit	Target Planlet (Individu)	Realisasi s/d Desember 2023		
				Planlet (indv)	% Planlet	Bibit (kg)
A	B	C	D	E	F	G
1	BBPAP JEPARA	<i>E cottonii</i>	3.000	3.000	100	3.970
2	BBPBL LAMPUNG	<i>E cottonii</i>	3.000	4.282	143	165
3	BPBAP SITUBONDO	<i>E cottonii</i>	3.000	5.275	176	70
4	BPBL LOMBOK	<i>E cottonii</i>	3.000	3.132	104	3.300
5	BPBL AMBON	<i>E cottonii</i>	3.000	8.736	291	2.672
6	BPBAP TAKALAR	<i>E cottonii</i>	3.000	5.220	174	8.360
TOTAL			18.000	29.645	164,69	18.537

Berdasarkan tabel di atas, produksi rumput laut kultur jaringan di 6 UPT penanggung jawab rumput laut tahun 2023 sebesar 29.645 individu/ planlet, capaian di atas target (18.000 individu/ planlet).

J. Persentase Keberhasilan Unit Pelaksana Teknis yang Mengembangkan Pembentukan pada Komoditas Lobster dan Kepiting

Tabel j. Persentase Keberhasilan Unit Pelaksana Teknis yang Mengembangkan Pembentukan pada Komoditas Lobster dan Kepiting

UPT	Komoditas	Target	Realisasi	Persentase
BBPBAP Jepara	Kepiting	SR 5% pada ukuran crablet 1 cm	10%	100%
BPBAP Takalar	Rajungan	SR 5% pada ukuran crablet 1 cm	12%	100%

UPT	Komoditas	Target	Realisasi	Persentase
BBPBAP Jepara	Lobster	Fase Phylosoma	Phylosoma D30	100%
BBPBL Lampung			Phylosoma D 4-36	
BPBL Lombok			Phylosoma D 4-9	
BPBL Ambon			Phylosoma D 4-25	
BPBAP Situbondo			Phylosoma D 32	
BPBAP Takalar			Phylosoma D 6-21	

Cara pengukuran :

Persentase keberhasilan

$$= \frac{\% \text{ keberhasilan teknologi lobster} + \% \text{ keberhasilan teknologi kepiting}}{2} \times 100\%$$

$$= \frac{100\% + 100\%}{2} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakukan perhitungan persentase keberhasilan unit pelaksana teknis yang mengembangkan pembentukan pada komoditas lobster dan kepiting sebesar 100 %.

K. Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun

Sampai dengan periode triwulan IV TA 2023 atau bulan Desember 2023, pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait dengan NSPK Bidang Perbenihan sebagai berikut :

1. Forum Jejaring Perbenihan

Kegiatan Forum Jejaring Perbenihan telah dilaksanakan pada 6-9 Juni 2023 bertempat di Golden Boutique Hotel Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Pusat serta pihak swasta.

Dalam kegiatan tersebut telah menghasilkan sebuah rumusan yaitu :

- a. Forum Jejaring Perbenihan sangat diperlukan sebagai wadah pertemuan rutin, untuk koordinasi dan komunikasi para produsen induk dan benih. Sehingga pemenuhan kebutuhan induk unggul dan benih bermutu dapat terpenuhi melalui suatu Jejaring yang terdiri dari para produsen induk dan benih, baik UPT KKP, UPT BRIN, UPTD di Provinsi, UPTD di Kabupaten/Kota, dan Swasta. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jejaring Perbenihan Nasional perlu penyesuaian, khususnya terkait nama nomenklatur anggota jejaring yang sudah berubah, status anggota jejaring yang tidak aktif dan anggota yang akan masuk menjadi anggota jejaring;
- b. Pelepasan jenis ikan baru merupakan hal penting untuk mendukung ketersediaan induk unggul. Tata cara pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan.
 - i. Setiap Jenis Ikan Baru yang akan dibudidayakan harus mendapatkan penetapan pelepasan dari Menteri.
 - ii. Pelepasan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah (pusat atau daerah) dan swasta/non pemerintah.
 - iii. Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan berasal dari:
 - Ikan Hasil Domestikasi;
 - Ikan Hasil Introduksi;

- Ikan Hasil Pemuliaan; dan
- Ikan Produk Rekayasa Genetik.
- iv. Untuk mendapatkan penetapan pelepasan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan : naskah akademik; dan usulan nama Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan.
- v. Naskah akademik minimal memuat :
 - hasil pengujian
 - penjelasan tentang kesesuaian, keunggulan, dan manfaat
 - kebenaran silsilah deskripsi dan metode
- vi. Pengujian fenotipe dan pengujian genotipe dilakukan di laboratorium atau fasilitas pengujian yang terakreditasi.
- vii. Dalam menyusun naskah akademik dan melakukan pengujian, pelaksanaan pelepasan jenis ikan baru dapat didampingi oleh tenaga ahli/pakar di bidang genetik ikan
- viii. Berdasarkan permohonan penetapan pelepasan jenis ikan baru (pelepasan), Menteri melakukan penilaian melalui Tim Penilai.
- ix. Tim penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri, dan hasil penilaian berupa : *dapat dilakukan pelepasan*; atau *tidak dapat dilakukan pelepasan*.
- c. Bagi UPTD/ Balai Benih Ikan di Kabupaten/Kota yang akan merencanakan anggaran APBD untuk BBI Komoditas Ikan Laut, maka dapat berkoordinasi terlebih dahulu secara temilis (Surat) dengan Ditjen Keuangan Daerah dengan mengacu pada aturan mengenai kewenangan Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi DAK ditetapkan oleh Bappenas, sesuai kriteria penetapan lokus kegiatan dari Bappenas. Mekanisme DAK untuk kegiatan Perbenihan
 - i. Direktorat Perbenihan menyusun menu kegiatan DAK untuk kegiatan di UPTD Perbenihan dan kegiatan Pemberdayaan (Bantuan UPR/HSRT) di Kabupaten/Kota;
 - ii. Direktorat Perbenihan mengusulkan calon lokasi prioritas (lokpri) kegiatan DAK Perbenihan kepada Biro Perencanaan dan

- Bappenas, berdasarkan lokasi Kampung Perikanan Budidaya, dan berdasarkan proposal/usulan dari daerah;
- iii. Pembahasan menu DAK dan calon lokpri antara Bappenas dan Biro Perencanaan KKP
 - iv. Penetapan menu DAK dan lokpri, serta alokasi anggaran DAK oleh Bappenas
 - v. Daerah menyusun perencanaan DAK melalui Aplikasi Krisna. Dalam input data usulan kegiatan DAK oleh operator Krisna, sangat diharapkan agar di Provinsi dan Kabupaten/Kota mengoptimalkan menu dan anggaran yang telah dialokasikan
 - vi. Daerah melengkapi usulan DAK dengan KAK, RAB dan data pendukung
 - vii. Asistensi DAK dengan Biro Perencanaan, dan DJPB
 - viii. Perbaikan dokumen usulan DAK
 - ix. Penetapan final alokasi dana dan lokasi DAK di tahun yang akan datang.
- e. Badan Riset dan Inovasi Nasional berkomitmen memberikan dukungan terhadap pengembangan induk komoditas unggulan perikanan budidaya (udang, rumput laut, lobster, kepiting dan nila salin serta komoditas lokal) melalui pembentukan “Rumah Program Riset *Aquaculture—BRIT*” yang akan berfokus pada kegiatan:
- i. Domestikasi dan pemuliaan ikan konsumsi untuk ketahanan pangan berbasis bioteknologi serta adaptif terhadap perubahan iklim
 - ii. Rekayasa lingkungan dan wadah akuakultur berkelanjutan
 - iii. Pengelolaan limbah budidaya ikan berbasis nirlimbah (zero waste) dan perubahan
 - iv. Teknologi pakan ramah lingkungan dan kesehatan ikan konsumsi
- f. Kegiatan pemuliaan perlu dilakukan untuk peremajaan atau menghasilkan induk unggul dan benih bermutu yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat. Feed back dari pengguna/masyarakat atas produk pemuliaan yang diproduksi diperlukan untuk mengetahui performa dan peningkatan kualitas.

- g. Pemberdayaan UPTD dan dukungan dari stakeholder/swasta diperlukan untuk memenuhi kebutuhan induk dan benih di masyarakat.

2. Penyusunan RSNI Bidang Perbenihan

Pada 8-11 Agustus 2023, telah dilakukan pembahasan usulan RSNI3 / Konsensus bidang perbenihan oleh Komisi Teknis 65-07 Perikanan Budidaya sebanyak 4 (empat) judul, yaitu :

Tabel k. Penyusunan RSNI Bidang Perbenihan

No	Judul	Konseptor	Instansi
1	Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758) – Bagian 1 : Induk	Dasu Rohmana	BBPBAT Sukabumi
2	Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758) – Bagian 2 : Benih	Ucu Cahyadi	BBPBAT Sukabumi
3	Ikan Kobia (<i>Rachycentron canadum</i> , Linnaeus 1766) – Bagian 4 : Produksi Induk	Suryadi Saputra	BRIN
4	Ikan Kobia (<i>Rachycentron canadum</i> , Linnaeus 1766) – Bagian 5 Induk	Suryadi Saputra	BRIN

Hasil pembahasan dinyatakan bahwa 4 judul tersebut diatas layak untuk menjadi RSNI 3 dan dilanjutkan tahap berikutnya yaitu jajak pendapat.

3. Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan

Pada tahun 2023 telah dilakukan penilaian terhadap usulan komoditas unggulan yaitu ikan patin pustina, udang Nusa Dewa, Ikan nila Sakti, dan ikan nila Nirwana IV. Penilaian kelayakan dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dinyatakan bahwa ke-4 komoditas tersebut telah layak dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri sebagai berikut :

- a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 180 tahun 2023 tentang Pelepasan Ikan Patin Pustina
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 181 tahun 2023 tentang Pelepasan Udang NuSa Dewa
- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 182 tahun 2023 tentang Pelepasan Ikan Nila Sakti

d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 202 tahun 2023 tentang Pelepasan Ikan Nila Nirwana IV

4. Rancangan Permen KP tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional

Pada periode tahun 2023 juga telah diusulkan rancangan Permen KP tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional (SIBINA) yang mengatur tentang hubungan saling ketergantungan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya plasma nutfah, produksi dan peredaran calon induk, induk, dan/atau benih ikan, pengendalian mutu, dan kelembagaan perbenihan untuk menjamin tersedianya induk unggul dan benih bermutu. Komponen sistem perbenihan nasional yaitu pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, produksi dan peredaran, kriteria dan persyaratan CPIB, pembinaan, sertifikasi, dan jejaring perbenihan ikan nasional.

Pada tahun 2023, target NSPK bidang perbenihan sebanyak 9 rekomendasi kebijakan, dan hingga triwulan 4, capaian NSPK bidang perbenihan adalah sebanyak 10 (sepuluh) rekomendasi kebijakan atau 111,11%.

Berdasarkan capaian IKU persentase NSPK bidang perbenihan yang disusun, maka hingga triwulan 3 capaiannya sebagai berikut :

Jumlah akumulatif rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan :

- s.d tahun 2022 = 35 rekomendasi

- s.d triwulan 4 tahun 2023 = 10 rekomendasi

Jumlah target rekomendasi kebijakan sampai dengan tahun 2024 : 64 rekomendasi kebijakan

$$\begin{aligned}\text{Persentase capaian} &= \frac{\text{jumlah akumulatif rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan}}{\text{jumlah target rekomendasi kebijakan s.d tahun 2024}} \times 100 \\ &= \frac{44}{64} \times 100 \\ &= 68,75\%\end{aligned}$$

L. Persentase Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang Diterbitkan Dibandingkan dengan Unit Pembenihan yang Dinilai

Tabel I. Persentase Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang Diterbitkan Dibandingkan dengan Unit Pembenihan yang Dinilai

No	Provinsi	Unit Dibahas	Unit Lulus	Unit Tidak Lulus
1	ACEH	7	4	3
2	SUMUT	40	37	3
3	SUMBAR	56	52	4
4	RIAU	56	53	3
5	KEPRI	39	38	1
6	JAMBI	32	28	4
7	KEPBABEL	19	19	0
8	BENGKULU	0	0	0
9	SUMSEL	0	0	0
10	LAMPUNG	41	41	0
11	BANTEN	29	26	3
12	DKI JAKARTA	4	4	0
13	JABAR	61	61	0
14	JATENG	45	45	0
15	DIY	15	15	0
16	JATIM	99	97	2
17	BALI	11	11	0
18	NTB	20	20	0
19	NTT	1	1	0
20	KALTARA	0	0	0
21	KALTIM	76	67	9
22	KALBAR	14	11	3
23	KALTENG	13	12	1
24	KALSEL	13	13	0
25	GORONTALO	0	0	0
26	SULUT	28	27	1
27	SULTENG	2	2	0
28	SULBAR	3	3	0
29	SULTRA	33	33	0
30	SULSEL	35	34	1
31	MALUKU	3	3	0
32	MALUT	0	0	0
33	PAPUA	4	4	0
34	PAPBAR	0	0	0
35	PAPTENG	0	0	0
36	PAPPEG	0	0	0
37	PAPSEL	0	0	0
38	PAPBARDA	0	0	0
TOTAL		799	761	38

$$\text{Presentase CPIB} = \frac{\text{Jumlah unit yang lulus Sertifikasi}}{\text{Jumlah unit yang dilakukan Sertifikasi}} = \frac{761}{799} \times 100\% = 95,24\%$$

Berdasarkan tabel di atas, persentase sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan dibandingkan dengan Unit Pembenihan yang dinilai tahun 2023 sebesar 95,24%, telah melampaui target (80%).

M. Nilai PM SAKIP Direktorat Perbenihan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

MEMORANDUM
NOMOR 2604/DJPB.1/HP.440/XI/2023

Yth. : Direktur Lingkup DJPB
 Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
 Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup
 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023
 Lampiran : -
 Tanggal : 8 November 2023

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tanggal 19 – 22 Juni 2023, diperoleh hasil untuk level 1 dengan nilai 80,83. Namun berdasarkan penilaian untuk level 2 diperoleh Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup eselon 2 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023 kantor pusat, yang berdasarkan LKE pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id sebagaimana ditampilkan tabel berikut :

No	Satuan Kerja	Nilai PM SAKIP 2023
1.	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	58,05 (CC)
2.	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	56,65 (CC)
3.	Direktorat Perbenihan	64,05 (B)
4.	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	73,15 (BB)

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan kerja keras untuk meningkatkan nilai PM SAKIP 2024 di Satker Pusat lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Untuk masing-masing pimpinan unit kerja agar memerintahkan dan mengarahkan petugas yang di tunjuk sebagai pengelola SAKIP untuk lebih patuh dan tertib dalam melaksanakan tugasnya dalam mendukung peningkatan nilai SAKIP dan semoga pelaksanaan AKIP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjadi lebih baik.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

N. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA

Tabel m. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA

Provinsi	Total
ACEH	12
BALI	150
BANTEN	91
BENGKULU	51
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2
DKI JAKARTA	27
GORONTALO	32
JAMBI	58
JAWA BARAT	1100
JAWA TENGAH	1420
JAWA TIMUR	1700
KALIMANTAN BARAT	42
KALIMANTAN SELATAN	267
KALIMANTAN TENGAH	7
KALIMANTAN TIMUR	26
KALIMANTAN UTARA	7
KEP. BANGKA BELITUNG	35
KEPULAUAN RIAU	31
LAMPUNG	615
MALUKU	8
MALUKU UTARA	3
NUSA TENGGARA BARAT	56
NUSA TENGGARA TIMUR	90
PAPUA	36
PAPUA BARAT	9
PAPUA BARAT DAYA	3
PAPUA SELATAN	33
RIAU	6
SULAWESI BARAT	28
SULAWESI SELATAN	303
SULAWESI TENGAH	27
SULAWESI TENGGARA	36
SULAWESI UTARA	10
SUMATERA BARAT	90
SUMATERA SELATAN	87
SUMATERA UTARA	65
Grand Total	6.671

Perhitungan Persentase, yaitu:

$$\Sigma \text{KUSUKA} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Yang Terlibat di Kegiatan Perbenihan Telah Terdaftar di Database}}{\text{Total Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{6.671}{960} \times 100\% = 694,89\%$$

Berdasarkan tabel di atas, pembenihan yang sudah terdaftar di KUSUKA dengan hasil capaian tahun 2023 sebesar 694,89%.

O. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup Direktorat Perbenihan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.217/DJPB.1/KP.720/I/2024 10 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Capaian IKU IP-ASN Semester II Tahun 2023
Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

Yth. Daftar terlampir

Sehubungan nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor 45/SJ.3/KP.110/I/2024, tanggal 5 Januari 2023 hal Pemberitahuan Batas Akhir Pengukuran Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Lingkungan KKP Semester II Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian IP ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya per tanggal 9 Januari 2024 dari hasil pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada *dashboard* IP ASN yang berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP yaitu **88,37 (kategori tinggi)**, yang terdiri dari **Kualifikasi 20,99; Kompetensi 37,29; Kinerja 25,08; dan Disiplin 5,00**. Adapun data capaian dapat dilihat pada *dashboard* di link opeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023/unker/515 atau telah kami rangkum sebagaimana pada lampiran 2.
2. Target Pengukuran IP ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2023 dibuat per semester dengan **target Nilai Semester Pertama 73** (kategori sedang) dan **target Nilai Semester Kedua 81** (kategori tinggi), metode pengambilan nilai, mengambil Nilai Semester Kedua Tahun 2023.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.
2. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

Lampiran 2
 Nomor : B.217/DJPB.1/KP.720/I/2024
 Tanggal : 10 Januari 2024

**REKAPITULASI NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN
 LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
 SEMESTER II TAHUN 2023**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1.	Sekretariat DJPB	20.98	39.17	25.00	5.00	90.16	Tinggi
2.	Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan	21.74	31.33	25.00	5.00	83.07	Tinggi
3.	Dit Perbenihan	21.61	33.31	25.00	5.00	84.91	Tinggi
4.	Dit Pakan dan Obat Ikan	21.28	34.72	25.00	5.00	86.01	Tinggi
5.	Dit Produksi dan Usaha Budidaya	22.06	31.43	25.00	5.00	83.49	Tinggi
6.	BBPBAP Jepara	20.88	39.59	25.00	4.98	90.45	Tinggi
7.	BBPBAT Sukabumi	21.08	37.22	24.38	5.00	87.67	Tinggi
8.	BBPBL Lampung	20.52	39.38	25.00	5.00	89.90	Tinggi
9.	BPBAP Situbondo	20.86	32.57	24.69	5.00	83.12	Tinggi
10.	BPBAP Takalar	20.62	40.00	25.00	5.00	90.62	Tinggi
11.	BPBAP Ujung Batee	21.21	37.67	25.00	5.00	88.88	Tinggi
12.	BPBAT Mandiangin	20.51	39.73	25.00	5.00	90.24	Tinggi
13.	BPBAT Sei Gelam, Jambi	20.93	39.75	25.25	5.00	90.93	Tinggi
14.	BPBAT Tatelu	20.92	39.72	25.00	5.00	90.64	Tinggi
15.	BPBL Ambon	20.89	39.73	25.71	5.00	91.34	Sangat Tinggi
16.	BPBL Batam	20.75	39.41	26.67	5.00	91.82	Sangat Tinggi
17.	BPBL Lombok	20.69	37.35	25.00	5.00	88.04	Tinggi
18.	BLUPPB Karawang	20.38	40.00	25.00	5.00	90.38	Tinggi
19.	BPIUUK Karangasem	20.89	38.44	25.00	5.00	89.33	Tinggi
20.	BPKIL Serang	21.06	35.29	25.00	5.00	86.35	Tinggi
	Rata-Rata	20.99	37.29	25.08	5.00	88.37	Tinggi

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
 Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,



**Ditandatangani
 Secara Elektronik**

Gemi Triastutik

P. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 7/SJ.7/TU.210/I/2024

Yth. : 1. Para Direktur lingkup KKP
2. Para Kepala Pusat lingkup KKP
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal lingkup KKP
4. Para Sekretaris Badan lingkup KKP
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal
6. Para Inspektur lingkup KKP

Dari : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Hal : Capaian Akhir IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Triwulan IV Tahun 2023

Lampiran : 2 (Dua) Berkas

Tanggal : 2 Januari 2024

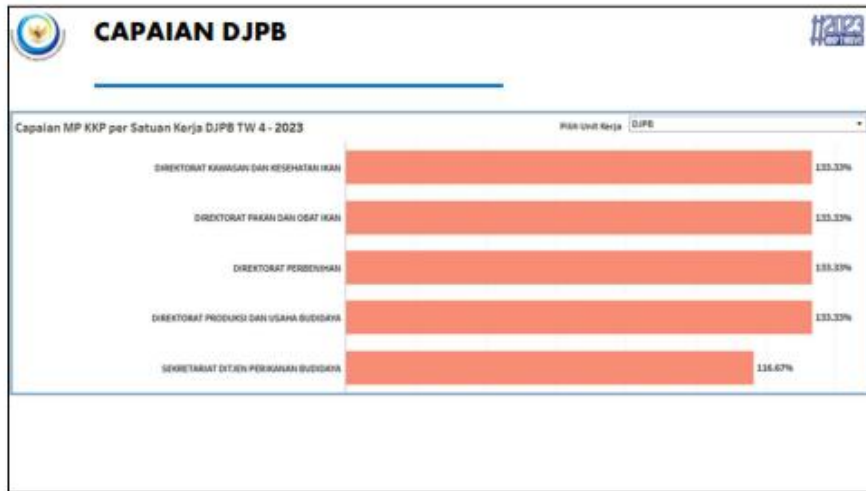
Dalam rangka pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (MP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan capaian akhir IKU MP KKP periode Triwulan IV Tahun 2023:

1. Penilaian capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan IV Tahun 2023 menggunakan *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>).
2. Nilai capaian IKU MP KKP pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar **129,32%**. Capaian tersebut diperoleh dari 9 (sembilan) unit kerja eselon I.
3. Nilai capaian tertinggi pada Triwulan IV Tahun 2023 diraih oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu sebesar **133,33%**.
4. Nilai capaian IKU MP KKP pada Tahun 2023 adalah sebesar **112,91%**. Capaian tersebut diperoleh dari rata-rata Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2023.
5. Nilai capaian tertinggi pada Tahun 2023 adalah sebesar **116,55%** diraih oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
6. Target capaian IKU MP KKP Tahun 2023 adalah sebesar 92%.

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 7/SJ.7/TU.210/I/2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

Capaian IKU MP KKP Tahun 2023

No	Unit Kerja	Triwulan				Capaian	Target	% Capaian
		I	II	III	IV			
1	SETJEN	98,93	99,34	118,75	133,33	112,59	92,00	122,38
2	DJPKRL	97,44	98,52	126,67	130,00	113,16	92,00	123,00
3	DJPT	100,00	100,00	126,67	133,33	115,00	92,00	125,00
4	DJPB	100,00	100,00	133,33	130,00	115,83	92,00	125,90
5	DJPDSPKP	100,00	100,00	133,33	130,00	115,83	92,00	125,90
6	DJPSPKP	98,37	95,67	126,67	126,67	111,85	92,00	121,57
7	ITJEN	100,00	95,93	113,89	122,22	108,01	92,00	117,40
8	BPPSDMKP	99,53	100,00	133,33	133,33	116,55	92,00	126,68
9	BPPMHKP	91,92	100,00	112,50	125,00	107,36	92,00	116,69



No	NAMA PELAKSANA	JABATAN	NAMA UNIT	NILAI SAAT INI	STATUS
1	WINDA WINDAATI HRP	AKSIUS EKSPLOKATOR BANG BANGTA	KELOMPOK PENGEMBANGAN USAHA	4	Terpenuhi
2	TRISULAL NEMANEMAN	DIREKTUR KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN	DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN	4	Terpenuhi
3	DEWA TRISULALYU	DIREKTORAN UMUM DINAS JENDERAL PERIKANAN	DIREKTORAT EKSTERN PERIKANAN BUDIDAYA	22	Terpenuhi
4	SUNGGU KUMARADINI KEDARUKANTYANAKALIA	DIREKTUR PERIKANAN DAN OBAT IKAN	DIREKTORAT PERIKANAN DAN OBAT IKAN	4	Terpenuhi
5	NINDI KANTYANAK	DIREKTUR PERBENIHAN	DIREKTORAT PERBENIHAN	4	Terpenuhi

**Q. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan
Pemeriksa Keuangan atas Satker Direktorat Perbenihan**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.142/DJPB.1/KU.130/II/2024 8 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 lembar
Hal : Capaian IKU Prosentase Penyelesaian LHP
BPK-RI

Yth. (terlampir)
di_
Tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan III Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian IKU "Prosentase Penyelesaian LHP BPK-RI sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari Jumlah rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK-RI yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 Juni 2023 (Triwulan II Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 30 September 2023 (Triwulan III 2023).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, presentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan III Tahun 2023 lingkup DJPB sebesar 100 % (tuntas).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dari masing-masing Satker disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n Dirjen Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran 2 Surat Dinas
 Nomor : B.142/DJPB.1/KU.130/I/2024
 Tanggal : 8 Januari 2024

**Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK
 atas Laporan Keuangan KKP” Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Temuan LHP BPK TA 2022	Temuan yang diselesaikan	Tuntas (%)	Sisa
1	BBPBL Lampung	-	-	100%	-
2	BBPBAT Sukabumi	-	-	100%	-
3	BBPBAP Jepara	-	-	100%	-
4	BPBL Ambon	-	-	100%	-
5	BPBAP Ujung Batee	-	-	100%	-
6	BPBAP Takalar	-	-	100%	-
7	BPBAT Sungai Gelam	-	-	100%	-
8	BPBAT Tatelu	-	-	100%	-
9	BPBAP Situbondo	-	-	100%	-
10	BPBAT Mandiangin	-	-	100%	-
11	BPBL Lombok	-	-	100%	-
12	BPBL Batam	-	-	100%	-
13	BLUPPB Karawang	-	-	100%	-
14	BPIUUK Karangasem	-	-	100%	-
15	BPKIL Serang	-	-	100%	-
16	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	3.601.915.382	3.601.915.382	100%	-
17	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	-	-	100%	-
18	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	-	-	100%	-
19	Direktorat Perbenihan	-	-	100%	-
20	Setditjen Perikanan Budidaya	-	-	100%	-
TOTAL		3.601.915.382	3.601.915.382	100%	-

R. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perbenihan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.43/DJPB.1/HP.620/II/2024 3 Januari 2024
Lampiran : 2 halaman
Sifat : Segera
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" Triwulan IV Tahun 2023

Yth. (Daftar terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan IV Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023 (Triwulan III Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 31 Desember 2023 (Triwulan IV 2023).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan IV Tahun 2023 lingkup DJPB sebesar 95,48% (tuntas 549 dari 575 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing Satker disampaikan pada lampiran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Direktorat Perikanan Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat Dinas
 Nomor : B.43/DJPB.1/HP.620/I/2024
 Tanggal : 3 Januari 2024

Data Rekapitulasi Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP" Triwulan IV Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi
1	Setditjen Perikanan Budidaya	129	115	89.15	14
2	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	9	9	100.00	0
3	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	26	26	100.00	0
4	Direktorat Perbenihan	17	17	100.00	0
5	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	0	0	100.00	0
6	BBPBL Lampung	26	25	96.15	1
7	BBPBAT Sukabumi	25	25	100.00	0
8	BBPBAP Jepara	14	11	78.57	3
9	BPBL Ambon	32	32	100.00	0
10	BPBAP Ujung Batee	28	27	96.43	1
11	BPBAP Takalar	50	50	100.00	0
12	BPBAT Sungai Gelam	13	13	100.00	0
13	BPBAT Tatelu	47	47	100.00	0
14	BPBAP Situbondo	6	6	100.00	0
15	BPBAT Mandiangin	37	37	100.00	0
16	BPBL Lombok	34	34	100.00	0
17	BPBL Batam	30	30	100.00	0
18	BLUPPB Karawang	38	34	89.47	4
19	BPIUUK Karangasem	6	5	83.33	1
20	LP2IL Serang	8	6	75.00	2
TOTAL		575	549	95.48	26

S. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan

LAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT PERBENIHAN TW 4

Layanan Perkantoran yang dilaksanakan di Direktorat Perbenihan pada periode TW 4 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penomoran Surat
2. Pelaksanaan rapat offline atau tatap muka

Data pelayanan perkantoran yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

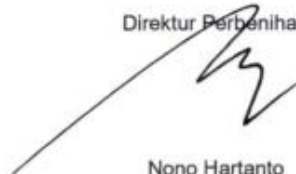
No	Jenis Layanan	Jumlah Permintaan	Permintaan Terlayani	Persentase (%)
1	Penomoran Surat	360	360	100
2	Rapat Offline	10	10	100

dengan rincian pelayanan per bulan tercantum pada tabel dibawah ini.

1. Penomoran Surat	
- Bulan Oktober	168 nomor
- Bulan November	122 nomor
- Bulan Desember	70 nomor
2. Rapat	
- Bulan Oktober	6 rapat
- Bulan November	2 rapat
- Bulan Desember	2 rapat

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Direktur Perbenihan



Nono Hartanto

T. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM

NOMOR 433 /ITJ/HP.410/XI/2023

Yth. : Menteri Kelautan dan Perikanan
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup KKP TA 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 3 November 2023

Menindaklanjuti ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Tahun 2022, kami laporkan bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Puslatluh BPPSDMKP). Evaluasi dilaksanakan secara uji petik dengan melibatkan Penyuluh Perikanan dan Auditor Inspektorat Jenderal, pada tanggal 9 s.d. 13 Oktober 2023, meliputi kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) dan BPPSDMKP Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Uji petik dilakukan pada 7 (tujuh) provinsi, yaitu 1) Jawa Barat; 2) Jawa Timur; 3) Kalimantan Timur; 4) Sulawesi Selatan; 5) Kepulauan Bangka Belitung; 6) Nusa Tenggara Barat; dan 7) Nusa Tenggara Timur. Jumlah kelompok penerima bantuan yang dilakukan evaluasi sebanyak 260 kelompok penerima bantuan dan 263 peserta pelatihan. Rincian jenis dan jumlah bantuan serta kabupaten/kota penerima sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
2. Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;
 - b. Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR, BSSN

2

- c. Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, **tingkat efektivitas pelaksanaan** kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut diperoleh nilai unit eselon I sebesar **80,91 s.d. 95,32** dan nilai KKP sebesar **88,63**, dari target sebesar **77,5** sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah Lingkup KKP Tahun 2022

JENIS BANTUAN	JUMLAH *		SKOR			
	BANTUAN	DIEVALUASI	PT	IG	AT	TOTAL
DJPT : Alat Penangkapan Ikan (API)	40	39	72,82	8,08	7,18	88,08
Vessel Monitoring Aid (VMA)	18	18	80,00	7,50	0,00	87,50
Kapal	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Mesin Kapal	18	18	80,00	7,78	10,00	97,78
TOTAL DJPT	77	76	76,32**	7,89**	6,18**	90,39**
DJPB : Mesin Pakan Ikan	40	40	68,88	9,38	4,75	83,00
Karamba Jaring Apung (KJA)	13	13	80,00	10,00	3,46	93,46
Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	59	55	54,82	9,73	5,73	70,27
Excavator	5	5	74,00	10,00	10,00	94,00
Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	10	10	80,00	9,00	8,00	97,00
Kincir	10	10	78,00	10,00	5,50	93,50
TOTAL DJPB	137	133	65,80**	9,62**	5,49**	80,91**
DJPDS : Pasar Ikan	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Chest Freezer	34	34	77,94	9,47	7,35	94,76
Gudang Beku/Portabel	2	2	80,00	10,00	10,00	100,00
Kendaraan Berpendingin	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Pabrik Es	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
TOTAL DJPDS	39	39	78,16**	9,53**	7,63**	95,32**
DJPRL : Bantuan Konservasi (KOMPAK)	2	2	80,00	10,00	10,00	100,00
Pengelolaan Sampah	2	2	72,50	10,00	10,00	92,50
Vegetasi Pantai	7	7	75,71	8,07	8,57	92,36
Wisata Bahari	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
TOTAL DJPKRL	12	12	76,25**	8,88**	9,17**	94,29**

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

3

JENIS BANTUAN	JUMLAH *		SKOR			
	BANTUAN	DIEVALUASI	PT	IG	AT	TOTAL
BPPSDM: Pelatihan Kepada Masyarakat	3730	263	72,89	8,79	9,03	90,71
TOTAL BPPSDMKP	3730	263	72,89	8,79	9,03	90,71
TOTAL KKP	3995	523	72,07**	8,93**	7,63**	88,63**

Keterangan:

* Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Uji Petik

** Merupakan skor rata-rata gabungan jenis bantuan

4. Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas, masih terdapat pemanfaatan bantuan yang belum sepenuhnya efektif, sebagai berikut:
- Pencapaian Tujuan memperoleh skor 72,07 antara lain adanya 21 (dua puluh satu) kelompok yang belum memanfaatkan bantuan, belum memperoleh manfaat bantuan, atau tidak melanjutkan pemanfaatan bantuan sesuai dengan tujuan penyaluran bantuan.
 - Integrasi memperoleh skor 8,93 antara lain kelompok penerima belum sepenuhnya memahami kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pemanfaatan bantuan yang telah diterima.
 - Adaptasi memperoleh skor 7,63 antara lain kelompok penerima belum berhasil mengembangkan bantuan yang diterimanya baik untuk pengembangan usaha kelompok atau menjadi acuan masyarakat lain dalam usaha perikanan dan kelautan.
- Hasil evaluasi terhadap kegiatan prioritas/bantuan pemerintah pada DJPT, DJPB, DJPDS, DJPKRL, dan BPPSDM tersebut telah dilakukan pembahasan dan pemberian rekomendasi perbaikan guna perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan penyalurannya.
5. Selanjutnya, tingkat efektivitas pengawasan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah diukur dengan menggabungkan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah pada Tabel 1 dengan hasil Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ lingkup KKP Tahun 2022, dan diperoleh **Tingkat efektivitas pengawasan** kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup KKP sebesar **89,31 dari target sebesar 81**, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/
Bantuan Pemerintah Lingkup KKP Tahun 2022

Unit Kerja Eselon I	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah	Efektivitas Pengawasan PBJ	Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah	Penanggung jawab evaluasi (Inspektora t)	Capaian Itjen
BPPSDMKP	90,71	87,69	89,502	I	89,31
DJPT	90,39	86,52	88,842	II	
DJPB	80,91	83,20	81,826	III	
DJPKRL	94,29	93,70	94,054	III	
DJPDSPKP	95,32	87,84	92,328	IV	

Demikian kami sampaikan, mohon perkenan arahan Bapak Menteri.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tornanda Syaifullah

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Para Direktur Jenderal lingkup KKP
3. Para Kepala Badan lingkup KKP

Lampiran Memorandum
 Nomor : 433 /ITJ/HP.410/XI/2023
 Tanggal : 3 November 2023

Rincian Jenis, Jumlah dan Kabupaten/Kota Penerima Bantuan yang Dievaluasi

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Bantuan	Jumlah Kelompok Penerima	Jumlah Kelompok Penerima yang Dievaluasi
A	Jawa Barat		1635	168
1	Sukabumi	Alat Penangkapan Ikan (API)	6	6
		Vessel Monitoring Aid (VMA)	18	18
		Mesin Pakan Ikan	5	5
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	9	9
		Excavator	1	1
		Chest Freezer	2	2
		Pelatihan kepada Masyarakat	335	20
2	Subang	Alat Penangkapan Ikan (API)	6	6
		Mesin Pakan Ikan	4	4
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	4	3
		Excavator	1	1
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	2	2
		Kincir	7	7
		Chest Freezer	4	4
		Pelatihan kepada Masyarakat	348	15
3	Indramayu	Alat Penangkapan Ikan (API)	3	3
		Mesin Pakan Ikan	4	4
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	2	2
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	2	2
		Kincir	2	2
		Chest Freezer	2	2
		Gudang Beku/Portabel	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	539	15
4	Tasikmalaya	Mesin Pakan Ikan	5	5
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	11	10
		Chest Freezer	1	1
		Vegetasi Pantai	3	3
		Pelatihan kepada Masyarakat	308	15
B	Jawa Timur		761	121
1	Gresik	Alat Penangkapan Ikan (API)	7	7
		Mesin Pakan Ikan	1	1
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	3	3
		Kincir	1	1
		Chest Freezer	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	163	15
2	Pasuruan	Mesin Pakan Ikan	1	1
		Chest Freezer	4	4
		Kendaraan Berpendingin	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	52	15
3	Jember	Alat Penangkapan Ikan (API)	1	1
		Chest Freezer	2	2

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Bantuan	Jumlah Kelompok Penerima	Jumlah Kelompok Penerima yang Dievaluasi
		Vegetasi Pantai	4	4
		Pelatihan kepada Masyarakat	98	15
4	Sampang	Alat Penangkapan Ikan (API)	3	3
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	6	6
		Pasar Ikan	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	3	3
		Pelatihan kepada Masyarakat	245	17
5	Banyuwangi	Alat Penangkapan Ikan (API)	1	1
		Kapal	1	1
		Mesin Pakan Ikan	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	1	1
		Pengelolaan Sampah	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	159	15
C	Kalimantan Timur		167	58
1	Penajam Paser Utara	Mesin Pakan Ikan	1	1
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	2	2
		Excavator	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	2	2
2	Berau	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	2	2
		Gudang Beku/Portabel	1	1
		Pengelolaan Sampah	1	1
		Wisata Bahari	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	30	17
3	Kota Balikpapan	Mesin Pakan Ikan	1	1
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	1	1
		Bantuan Konservasi (KOMPAK)	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	4	3
4	Kutai Kertanegara	Mesin Pakan Ikan	3	3
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	2	1
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	3	3
		Pelatihan kepada Masyarakat	109	15
D	Sulawesi Selatan		878	105
1	Pinrang	Mesin Pakan Ikan	3	3
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	6	6
		Excavator	1	1
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	2	2
		<i>Chest Freezer</i>	4	4
		Pelatihan kepada Masyarakat	203	15
2	Bantaeng	Alat Penangkapan Ikan (API)	6	6
		Mesin Pakan Ikan	5	5
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	7	7
		<i>Chest Freezer</i>	2	2
		Pelatihan kepada Masyarakat	302	17
3	Bulukumba	Mesin Pakan Ikan	1	1

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Bantuan	Jumlah Kelompok Penerima	Jumlah Kelompok Penerima yang Dievaluasi
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	2	2
		Bantuan Konservasi (KOMPAK)	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	1	1
4	Bone	Alat Penangkapan Ikan (API)	4	4
		Mesin Pakan Ikan	4	4
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	6	5
		Excavator	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	2	2
		Pelatihan kepada Masyarakat	314	15
E	Kep. Bangka Belitung		24	23
	Bangka Barat	Alat Penangkapan Ikan (API)	2	1
		Mesin Kapal	18	18
		Pelatihan kepada Masyarakat	4	4
F	Nusa Tenggara Barat		225	30
	Lombok Timur	Mesin Pakan Ikan	1	1
		Karamba Jaring Apung (KJA)	13	13
		Pelatihan kepada Masyarakat	211	16
G	Nusa Tenggara Timur		305	18
	Kota Kupang	Alat Penangkapan Ikan (API)	1	1
		Pabrik Es	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	303	16
		TOTAL	3.995	523

U. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
Satuan Kerja : 632462 SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Hal 1 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	65,698,500,000	0	57,967,329,072	7,715,147,950	65,682,477,022	99.98 %	16,022,978
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	65,698,500,000	0	57,967,329,072	7,715,147,950	65,682,477,022	99.98 %	16,022,978
HB.2344 Pengelolaan Perbenihan Ikan	65,698,500,000	0	57,967,329,072	7,715,147,950	65,682,477,022	99.98 %	16,022,978
BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	1,875,000,000	0	1,773,526,750	101,278,250	1,874,805,000	99.99 %	195,000
BAB.001 Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan	1,875,000,000	0	1,773,526,750	101,278,250	1,874,805,000	99.99 %	195,000
051 Sertifikasi CPIB	1,875,000,000	0	1,773,526,750	101,278,250	1,874,805,000	99.99 %	195,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,294,357,000	0	1,199,078,750	101,278,250	1,294,357,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000	100.00 %	0
000003. Sertifikat CPIB	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,262,357,000	0	1,101,078,750	101,278,250	1,262,357,000	100.00 %	0
003319. Dalam rangka Pembinaan Unit Pembenihan	287,058,000	0	287,058,000	0	287,058,000	100.00 %	0
003320. Dalam rangka Sertifikasi Unit Pembenihan	795,872,000	0	694,593,750	101,278,250	795,872,000	100.00 %	0
003321. Dalam rangka Surveilans Unit Pembenihan	179,427,000	0	179,427,000	0	179,427,000	100.00 %	0
051.0B HARMONISASI PERBENIHAN	580,643,000	0	580,448,000	0	580,448,000	99.97 %	195,000
521211 Belanja Bahan	59,055,000	0	59,048,000	0	59,048,000	99.99 %	7,000
000106. Perengkapan Peserta	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000	100.00 %	0
000107. ATK	4,424,000	0	4,424,000	0	4,424,000	100.00 %	0
000108. Bahan Komputer	4,424,000	0	4,424,000	0	4,424,000	100.00 %	0
000109. Spanduk	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00 %	0
000110. Pengcetakan Laporan	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00 %	0
003322. Pencetakan Sertifikat Refreshment (iso 9001-2015)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00 %	0
003339. Penggandaan bahan / Foto copy	3,207,000	0	3,200,000	0	3,200,000	99.78 %	7,000
522131 Belanja Jasa Konsultan	50,000,000	0	49,900,000	0	49,900,000	99.80 %	100,000
000111. Perbaikan checklist CPIB	50,000,000	0	49,900,000	0	49,900,000	99.80 %	100,000
522151 Belanja Jasa Profesi	15,300,000	0	15,300,000	0	15,300,000	100.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
Satuan Kerja : 632462 SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Hal 10 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
RBD.004 Percontohan Perbenihan Komoditas Unggulan	3,310,000,000	0	2,968,625,900	340,386,000	3,309,011,900	99.97 %	988,100
052 Percontohan Perbenihan Lainnya	3,310,000,000	0	2,968,625,900	340,386,000	3,309,011,900	99.97 %	988,100
052.0A PERCONTOHAN KJA HDPE BULAT	3,160,600,000	0	2,968,625,900	191,874,000	3,160,499,900	100.00 %	100,100
521211 Belanja Bahan	40,500,000	0	0	40,400,000	40,400,000	99.75 %	100,000
004451. Seragam Olah raga	40,500,000	0	0	40,400,000	40,400,000	99.75 %	100,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	184,500,000	0	33,025,900	151,474,000	184,499,900	100.00 %	100
003959. Dalam rangka pendampingan kegiatan pengembangan	184,500,000	0	33,025,900	151,474,000	184,499,900	100.00 %	100
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,935,600,000	0	2,935,600,000	0	2,935,600,000	100.00 %	0
003901. Rumah Apung Ikat Rumpuk Laut	2,768,900,000	0	2,768,900,000	0	2,768,900,000	100.00 %	0
004110. Laptop	166,700,000	0	166,700,000	0	166,700,000	100.00 %	0
052.0B TEMU LAPANG BUDIDAYA IKAN LAUT	149,400,000	0	0	148,512,000	148,512,000	99.41 %	888,000
521211 Belanja Bahan	62,960,000	0	0	62,960,000	62,960,000	100.00 %	0
003962. Perengkapan peserta	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	100.00 %	0
003963. ATK	2,200,000	0	0	2,200,000	2,200,000	100.00 %	0
003964. Bahan Komputer	2,160,000	0	0	2,160,000	2,160,000	100.00 %	0
003965. Konsumsi	12,600,000	0	0	12,600,000	12,600,000	100.00 %	0
004450. Penggandaan Materi	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00 %	0
522141 Belanja Sewa	22,600,000	0	0	21,712,000	21,712,000	96.07 %	888,000
003966. Sewa Tenda/Gedung pertemuan dan perlengkapan	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	100.00 %	0
003967. Sewa kendaraan roda 4	7,600,000	0	0	6,712,000	6,712,000	88.32 %	888,000
522151 Belanja Jasa Profesi	16,200,000	0	0	16,200,000	16,200,000	100.00 %	0
003968. Narasumber Eselon II	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	100.00 %	0
003969. Narasumber Pakar	10,200,000	0	0	10,200,000	10,200,000	100.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	100.00 %	0
004425. Vidiotron	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,640,000	0	0	32,640,000	32,640,000	100.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERBENIHAN TAHUN 2023

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
Satuan Kerja : 632462 SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Hal 9 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
003701. Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi	115.310.000	0	115.308.000	0	115.308.000	100,00	2.000
003702. Dalam rangka pendampingan kegiatan prioritas	181.600.000	0	181.600.000	0	181.600.000	100,00	0
526115. Bantuan Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	8.793.421.000	0	3.099.793.000	3.099.600.000	8.793.393.000	100,00	28.000
003703. Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL)	680.000.000	0	680.000.000	0	680.000.000	100,00	0
003705. Bantuan Sarana budidaya rumput laut (SBRL)	6.156.000.000	0	2.462.400.000	3.693.600.000	6.156.000.000	100,00	0
004090. Bantuan Jangkar Rumput Laut	428.400.000	0	428.400.000	0	428.400.000	100,00	0
004091. Bantuan Perahu Ketinting	1.485.000.000	0	1.485.000.000	0	1.485.000.000	100,00	0
004200. Bantuan bibit rumput laut	44.021.000	0	43.993.000	0	43.993.000	99,94	28.000
RBO Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	3.310.000.000	0	4.322.837.293	385.262.200	5.308.099.793	99,95	1.900.207
RBQ.002 Pusat Produksi Benih dan Induk yang dikembangkan	2.000.000.000	0	1.954.211.693	44.876.200	1.999.087.893	99,95	912.107
051 Pusat Produksi Benih dan Induk	2.000.000.000	0	1.954.211.693	44.876.200	1.999.087.893	99,95	912.107
051.08 Perencanaan Pembangunan Pusat Produksi Induk dan Benih di Lampung	310.050.000	0	279.686.200	29.453.200	309.139.400	99,71	910.600
521131. Bantuan Jasa Konsultansi	198.050.000	0	198.050.000	0	198.050.000	100,00	0
000453. Jasa konsultansi DED pusat produksi induk	99.500.000	0	99.500.000	0	99.500.000	100,00	0
003242. Jasa Konsultansi Survey Topografi Lahan untuk Pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk	98.550.000	0	98.550.000	0	98.550.000	100,00	0
524111. Bantuan Perjalanan Dinas Biasa	112.000.000	0	81.636.200	29.453.200	111.089.400	99,19	910.600
000455. Dalam Rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan	112.000.000	0	81.636.200	29.453.200	111.089.400	99,19	910.600
051.0C Petaksanaan Kegiatan di Pusat Produksi Induk dan Benih di Lampung	1.089.950.000	0	1.674.525.493	15.423.000	1.689.948.493	100,00	1.507
521822. Bantuan Barang Persediaan barang dalam proses	1.089.950.000	0	1.674.525.493	15.423.000	1.689.948.493	100,00	1.507
004077. Pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk di Kab. Masuji	1.378.700.000	0	1.378.699.400	0	1.378.699.400	100,00	600
004078. Konsultansi Pengawas Pembangunan pusat produksi Benih dan Induk di Kab. Masuji	98.500.000	0	98.500.000	0	98.500.000	100,00	0
004111. Prasarana Tambahan Pusat Produksi Benih dan Induk di Masuji	186.986.000	0	186.985.925	0	186.985.925	100,00	75
004124. PTP PKKPR / Dukemen perijinan / SPPL Pusat produksi benih dan induk di Kab. Masuji	10.341.000	0	10.340.168	0	10.340.168	99,99	832
004448. Uji Coba Pengisian Air Tandon dan Filter	15.423.000	0	0	15.423.000	15.423.000	100,00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
Satuan Kerja : 632462 SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Hal 8 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
003837. Pembangunan mess unit produksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan	179.847.000	0	179.846.658	0	179.846.658	100,00	342
003838. Rehab kantor unit produksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan	179.247.000	0	179.247.000	0	179.247.000	100,00	0
003839. Pembangunan pagar keliling unit produksi bibit rumput laut kultur jaringan	179.186.000	0	179.185.859	0	179.185.859	100,00	141
003840. pengawasan rehab kantor, mess, operator, canopy, pemasangan paving block dan dan pagar keliling	99.333.000	0	99.332.221	0	99.332.221	100,00	779
003805. Pengadaan Bahan Rehab kantor unit produksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan	456.208.000	0	456.045.440	0	456.045.440	99,96	162.560
526115. Bantuan Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.182.601.000	0	1.068.807.943	106.270.000	1.175.077.943	99,36	7.523.057
003570. Biaya pemasangan jaringan Listrik, Air PDAM, Penerbitan NDI dan SLO	79.060.000	0	79.060.000	0	79.060.000	100,00	0
003571. Bantuan kendaraan roda 3	46.800.000	0	0	46.800.000	46.800.000	100,00	0
003572. Bantuan staefer lab kuljar (Mikropogaul, Kulus dan planlet)	61.875.000	0	61.875.000	0	61.875.000	100,00	0
003573. Bantuan percontohan pengembangan planlet rumput laut kultur jaringan	199.000.000	0	199.000.000	0	199.000.000	100,00	0
003574. Bantuan Meubelair dan peralatan operasional Lab. Kuljar	196.465.000	0	196.460.343	0	196.460.343	100,00	4.657
003575. Bantuan peralatan dan bahan lab kuljar	357.184.000	0	350.180.000	0	350.180.000	98,04	7.004.000
003844. Bantuan bouy sarana penanda rumput laut	44.870.000	0	0	44.870.000	44.870.000	100,00	0
003845. Pembuatan papan nama Kantor UPBRL	38.751.000	0	38.639.100	0	38.639.100	99,71	111.900
003846. Bantuan peralatan kantor	128.596.000	0	128.593.500	0	128.593.500	100,00	2.500
004198. Bantuan Prasasti peresmian	15.000.000	0	0	14.600.000	14.600.000	97,33	400.000
004199. Bantuan papan petunjuk dan keterangan	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	100,00	0
051.0C MODÉLLING RUMPUT LAUT DI KABUPATEN WAKATÖBI	9.523.411.000	0	5.709.701.000	3.813.680.000	9.523.381.000	100,00	30.000
522141. Bantuan Sewa	42.500.000	0	42.500.000	0	42.500.000	100,00	0
003847. Sewa Kendaraan roda 2	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	100,00	0
003848. Sewa kantor untuk petugas lapangan	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	100,00	0
524111. Bantuan Perjalanan Dinas Biasa	687.490.000	0	567.408.000	120.080.000	687.488.000	100,00	2.000
003899. Dalam rangka Identifikasi dan Verifikasi bantuan	135.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	100,00	0
003700. Dalam rangka pemeriksaan bantuan	255.580.000	0	135.500.000	120.080.000	255.580.000	100,00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERBENIHAN TAHUN 2023

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
Satuan Kerja : 632462 SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Hal 7 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA	10,598,026,000	0	10,598,862,028	0	10,598,862,028	99.99 %	1,163,972
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,029,180,000	0	1,028,484,850	0	1,028,484,850	99.93 %	895,150
000297. Dalam rangka identifikasi dan verifikasi bantuan	376,500,000	0	376,500,000	0	376,500,000	100.00 %	0
003323. Dalam rangka Pemeriksaan Bantuan	370,500,000	0	370,509,300	0	370,509,300	100.00 %	700
003324. Dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan	282,120,000	0	281,425,550	0	281,425,550	99.75 %	694,450
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Permda	9,568,846,000	0	9,568,377,178	0	9,568,377,178	100.00 %	468,822
000334. Bantuan Keramba Jaring Apung HDPE	4,815,520,000	0	4,815,424,000	0	4,815,424,000	100.00 %	96,000
000336. Jaring KJA Besar Paket 1	884,056,000	0	884,000,000	0	884,000,000	99.99 %	56,000
000337. Bantuan Kebun Bibit rumput laut Tahap I	1,004,700,000	0	1,004,756,400	0	1,004,756,400	100.00 %	3,600
000338. Sarana unit pembenihan rakyat (Paket 1)	110,540,000	0	110,439,580	0	110,439,580	99.90 %	106,420
003325. Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut Tahap II	895,320,000	0	895,320,000	0	895,320,000	100.00 %	0
003363. Jaring KJA Kecil Paket 1	720,803,000	0	720,750,000	0	720,750,000	99.99 %	53,000
003408. Sarana unit pembenihan rakyat (Paket 2)	179,820,000	0	179,810,424	0	179,810,424	99.99 %	9,576
003409. Sarana unit pembenihan rakyat (Paket 3)	150,000,000	0	149,973,979	0	149,973,979	99.98 %	26,021
003410. Sarana unit pembenihan rakyat (Paket 4)	119,600,000	0	119,515,145	0	119,515,145	99.93 %	84,855
003411. Sarana unit pembenihan rakyat (Paket 5)	179,685,000	0	179,683,490	0	179,683,490	99.99 %	1,510
003412. Sarana unit pembenihan rakyat (Paket 6)	149,600,000	0	149,573,000	0	149,573,000	99.98 %	27,000
003413. Sarana unit pembenihan rakyat (Paket 7)	179,304,000	0	179,300,000	0	179,300,000	100.00 %	4,000
003414. Sarana unit pembenihan rakyat (Paket 8)	179,832,000	0	179,831,160	0	179,831,160	100.00 %	840
051.0B PEMBANGUNAN UNIT PRODUKSI BIBIT RUMPUT LAUT DI KAB. WAKATOBİ	3,860,063,000	0	3,746,099,121	106,270,000	3,852,369,121	99.80 %	7,693,879
526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Permda	2,677,462,000	0	2,677,291,178	0	2,677,291,178	99.99 %	170,822
003568. Pengawasan Pembangunan Unit Produksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan	99,012,000	0	99,012,000	0	99,012,000	100.00 %	0
003569. Pembangunan Unit Produksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan	1,340,822,000	0	1,340,822,000	0	1,340,822,000	100.00 %	0
003831. Pembangunan Canopy parkir,taman dan pemasangan paving block	143,807,000	0	143,800,000	0	143,800,000	100.00 %	7,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
Satuan Kerja : 632462 SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Hal 6 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000430. Bantuan KJA HDPE Mendukung MLIN	6,985,580,000	0	6,985,560,530	0	6,985,560,530	100.00 %	19,470
003341. Bantuan KJA HDPE Paket 2	2,911,700,000	0	2,911,712,000	0	2,911,712,000	100.00 %	48,000
003342. Bantuan KJA HDPE Paket 3	2,349,880,000	0	2,349,831,000	0	2,349,831,000	100.00 %	49,000
003343. Bantuan KJA HDPE Paket 4	1,265,271,000	0	1,265,271,000	0	1,265,271,000	100.00 %	0
003344. Bantuan KJA HDPE Paket 5	1,659,217,000	0	1,659,200,000	0	1,659,200,000	100.00 %	17,000
003346. Bantuan KJA HDPE Paket 7	1,750,950,000	0	0	1,750,941,500	1,750,941,500	100.00 %	8,500
003359. Bantuan KJA HDPE Paket 20	2,155,920,000	0	2,155,898,500	0	2,155,898,500	100.00 %	21,500
003360. Bantuan KJA HDPE Paket 21	2,007,902,000	0	2,007,893,500	0	2,007,893,500	100.00 %	8,500
004109. Bantuan KJA HDPE Paket 6	500,000,000	0	0	509,928,000	509,928,000	99.99 %	72,000
004197. Bantuan KJA HDPE Paket 8	286,563,000	0	0	286,464,000	286,464,000	99.97 %	99,000
053.0C Penataan Kawasan Budidaya Laut	623,085,000	0	552,954,500	69,817,600	622,772,100	99.95 %	312,900
521211 Belanja Bahan	50,000,000	0	0	49,937,500	49,937,500	99.88 %	62,500
004406. Seragam Lapangan Tim Satgas	50,000,000	0	0	49,937,500	49,937,500	99.88 %	62,500
522131 Belanja Jasa Konsultansi	510,684,000	0	510,553,500	0	510,553,500	99.97 %	130,500
003239. Studi Kelayakan Kawasan Rumput Laut Wakatobi	100,000,000	0	99,970,000	0	99,970,000	99.97 %	30,000
003240. Masterplan Kawasan Rumput Laut Wakatobi	99,734,000	0	99,733,500	0	99,733,500	100.00 %	500
003241. Penilaian KJA Offshore	100,000,000	0	99,900,000	0	99,900,000	99.90 %	100,000
003437. Penyusunan DED Lab. KKultur Jaringan Rumput Laut	98,900,000	0	98,900,000	0	98,900,000	100.00 %	0
003973. Penyusunan DED Rumah Ikat dan Gudang Rumput Laut	43,050,000	0	43,050,000	0	43,050,000	100.00 %	0
004007. Vidio 3 D Pengembangan Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000	100.00 %	0
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Permda	62,401,000	0	42,401,000	19,880,100	62,281,100	99.81 %	119,900
004335. Bantuan panel Listrik UPBRL	42,401,000	0	42,401,000	0	42,401,000	100.00 %	0
004405. Bantuan Bahan dan Peralatan Lab	20,000,000	0	0	19,880,100	19,880,100	99.40 %	119,900
051.004 Sarana perbenihan di Kampung Perikanan Budidaya yang diserahkan ke masyarakat	23,981,500,000	0	20,052,662,149	3,919,950,000	23,972,612,149	99.96 %	8,887,851
051 Sarana Perbenihan di Kampung Perikanan Budidaya	23,981,500,000	0	20,052,662,149	3,919,950,000	23,972,612,149	99.96 %	8,887,851

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERBENIHAN TAHUN 2023

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
 Satuan Kerja : 632462 SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Hal 3 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000143. ATK	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000146. Perlengkapan peserta	12,880,000	0	12,425,000	0	12,425,000	96.47 %	455,000
000147. Bahan Komputer	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000148. Spanduk	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000149. Penggandaan Materi	2,075,000	0	2,075,000	0	2,075,000	100.00	0
522151. Belanja Jasa Profesi	20,400,000	0	20,400,000	0	20,400,000	100.00	0
000151. Narasumber Pakar dan Eselon III	20,400,000	0	20,400,000	0	20,400,000	100.00	0
524119. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	115,180,000	0	115,174,700	0	115,174,700	100.00	5,300
000152. Perjalanan Narasumber dan Peserta	12,880,000	0	12,874,700	0	12,874,700	99.96 %	5,300
000153. Fullboard Meeting	86,100,000	0	86,100,000	0	86,100,000	100.00	0
000154. Uang harian	16,200,000	0	16,200,000	0	16,200,000	100.00	0
051.0F. RSNi Bidang Perbenihan	244,901,000	0	244,901,000	0	244,901,000	100.00	0
521211. Belanja Bahan	26,701,000	0	26,701,000	0	26,701,000	100.00	0
000163. Perlengkapan Peserta 25 orang x 2 kali	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
000164. ATK	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
000165. Bahan Komputer	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
000166. Penggandaan Materi	3,701,000	0	3,701,000	0	3,701,000	100.00	0
522151. Belanja Jasa Profesi	73,800,000	0	73,800,000	0	73,800,000	100.00	0
000168. Narasumber Pakar	25,200,000	0	25,200,000	0	25,200,000	100.00	0
003504. Narasumber Eselon III	48,600,000	0	48,600,000	0	48,600,000	100.00	0
524119. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	144,400,000	0	144,400,000	0	144,400,000	100.00	0
000169. Full Board Meeting	123,000,000	0	123,000,000	0	123,000,000	100.00	0
000170. Transport Narasumber dan peserta	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000	100.00	0
000171. Uang harian peserta	15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000	100.00	0
051.0G. SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI	229,670,000	0	227,936,000	0	227,936,000	99.25 %	1,734,000
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	229,670,000	0	227,936,000	0	227,936,000	99.25 %	1,734,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERBENIHAN TAHUN 2023

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
Satuan Kerja : 632462 SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Hal 2 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000112. Narasumber Pakar	15.300.000	0	15.300.000	0	15.300.000	100,00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	456.288.000	0	456.200.000	0	456.200.000	99,98 %	88.000
000113. Transport Peserta	139.216.000	0	139.200.000	0	139.200.000	99,99 %	16.000
000114. Fullboard Meeting	246.000.000	0	246.000.000	0	246.000.000	100,00	0
000115. Uang Harian	52.272.000	0	52.200.000	0	52.200.000	99,86 %	72.000
003340. Perjalanan Panitia	18.800.000	0	18.800.000	0	18.800.000	100,00	0
FBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	8.332.000.000	0	8.010.407.700	312.230.850	8.328.698.550	99,96 %	3.301.450
PBR.001 Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Perbenihan	8.332.000.000	0	8.010.407.700	312.230.850	8.328.698.550	99,96 %	3.301.450
051 NSPK yang disusun	1.081.505.000	0	1.079.310.700	0	1.079.310.700	99,80 %	2.194.300
051.08 FORUM JEJARING PERBENIHAN	453.599.000	0	453.599.000	0	453.599.000	100,00	0
521211 Belanja Bahan	31.609.000	0	31.609.000	0	31.609.000	100,00	0
000125. Perengkapan Peserta	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	100,00	0
000126. ATK	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	100,00	0
000127. Bahan Komputer	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	100,00	0
000128. Spanduk	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	100,00	0
000129. Penggandaan Materi	1.959.000	0	1.959.000	0	1.959.000	100,00	0
003646. Pengadaan Sertifikat peserta	1.650.000	0	1.650.000	0	1.650.000	100,00	0
521211 Belanja Jasa Profesi	15.300.000	0	15.300.000	0	15.300.000	100,00	0
000131. Narasumber Pakar dan Eselon III	15.300.000	0	15.300.000	0	15.300.000	100,00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	406.690.000	0	406.690.000	0	406.690.000	100,00	0
003520. Fullboard Meeting	346.500.000	0	346.500.000	0	346.500.000	100,00	0
003521. Uang Harian	35.280.000	0	35.280.000	0	35.280.000	100,00	0
003522. Perjalanan Narasumber dan Peserta Pusat	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	100,00	0
003523. Perjalanan Panitia	19.910.000	0	19.910.000	0	19.910.000	100,00	0
051.0C TEMU KOOORDINASI PENILAIAN PELEPASAN INDUK DAN BENIH	153.335.000	0	152.874.700	0	152.874.700	99,70 %	460.300
521211 Belanja Bahan	17.755.000	0	17.300.000	0	17.300.000	97,44 %	455.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
Satuan Kerja : 632462 SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Hal 11 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
003970. Transport peserta	14.400.000	0	0	0	14.400.000	100,00	0
003972. Uang harian peserta	18.240.000	0	0	0	18.240.000	100,00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir